

**PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, TINGKAT PARTISIPASI
ANGKATAN KERJA DAN UPAH MINIMUM TERHADAP
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI PROVINSI JAWA
TIMUR PADA TAHUN 2011-2020**

SKRIPSI

Oleh :

FIRDA AULIAH ANGGRAENI

NIM : G71219044



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2023**

PERNYATAAN

Saya, Firda Auliyah Anggraeni, G71219044, menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 08 Februari 2023



Firda Auliyah Anggraeni
NIM.G71219044

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Surabaya, 09 Februari 2023

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by several vertical strokes and a horizontal line at the bottom.

Abdullah Kafabih, S.EI, M.SE
NIP. 199108072019031006

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA DAN UPAH MINIMUM TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI PROVINSI JAWA TIMUR PADA TAHUN 2011-2020

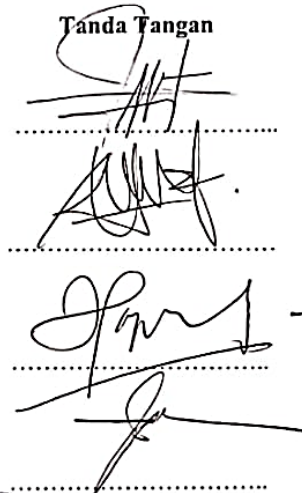
Oleh
Firda Auliyah Anggraeni
NIM: G71219044

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 21 Februari 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
diterima

Susunan Dewan Penguji:

1. Abdullah Kafabih, S.EI, M.S.E.
NIP. 199108072019031006
(Penguji 1)
2. Nurul Lathifah, S.A., M.A.
NIP. 198905282018012001
(Penguji 2)
3. Hapsari Wiji Utami, S.E., M.S.E.
NIP. 198603082019032012
(Penguji 3)
4. Debby Nindya Istiandari, M.E.
NIP. 199512142022032002
(Penguji 4)

Tanda Tangan



Surabaya, 21 Februari 2023



Dr. Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.
NIP. 197005142000031001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Firda Auliyah Anggraeni
NIM : G71219044
Fakultas/Jurusan : FEBI / Ilmu Ekonomi
E-mail address : firdauliyaha@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA
DAN UPAH MINIMUM TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI
PROVINSI JAWA TIMUR PADA TAHUN 2011-2020

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Maret 2023

Penulis

(Firda Auliyah Anggraeni)

ABSTRAK

Data tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Timur menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Terdapat beberapa variabel yang relevan untuk mengetahui penyebab terjadinya fluktuasi angka tingkat pengangguran terbuka, diantaranya jumlah penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja dan upah minimum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh jumlah penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011-2020.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Data penelitian ini menggunakan data sekunder, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur, Badan Pusat Statistik Survei Angkatan Kerja dan Buku Laporan Eksekutif Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan regresi data panel, sehingga dapat diestimasi menggunakan tiga model, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Untuk mendapatkan model terbaik dilakukan dua uji, yaitu uji Chow dan uji Hausman. Pada penelitian ini ditemukan model terbaiknya yaitu *Fixed Effect Model*.

Hasil penelitian dengan persamaan model analisis regresi data panel yaitu $LOGTPT_{it} = -38,737 + 3,317 LOGJP_{it} - 0,324 LOGTPAK_{it} - 0,252 LOGUMK_{it} + \varepsilon_{it}$. Yang membuktikan bahwa secara parsial variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka, variabel tingkat partisipasi angkatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka, dan variabel upah minimum tidak berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Sedangkan, secara simultan berpengaruh signifikan yang sebesar 68 persen antara variabel jumlah penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka.

Pemerintah diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran terbuka dengan lebih memperhatikan tingkat jumlah penduduk yang mempengaruhi pengangguran terbuka, perlunya mengurangi ledakan jumlah penduduk dengan mengadakan sosialisasi keluarga berencana, risiko menikah muda di seluruh daerah secara merata karena jika angka jumlah penduduk dapat ditekan maka TPT juga dapat berkurang dengan itu dapat mengurangi jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur.

Kata Kunci : Tingkat Pengangguran Terbuka, Jumlah Penduduk, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum

ABSTRACT

Data on the open unemployment rate for East Java Province show fluctuating developments. There are several relevant variables to determine the causes of fluctuations in the open unemployment rate, including population, labor force participation rate, and minimum wage. The purpose of this study is to identify the effect of population, labor force participation rate and minimum wage on the open unemployment rate in East Java Province in 2011-2020.

This research uses a descriptive quantitative research type. The data for this study used secondary data, which were obtained from the Central Bureau of Statistics, the Decree of the Governor of East Java Province, the Central Bureau of Labor Force Survey Statistics and the Executive Report Book on the Condition of the East Java Province Workforce. This study uses panel data regression, so that it can be estimated using three models, namely the Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), and Random Effect Model (REM). To get the best model, two tests were carried out, namely the Chow test and the Hausman test. In this study, the best model was found, namely the Fixed Effect Model.

The results of the study with the panel data regression analysis model equation are $LOGTPT_{it} = -38.737 + 3.317 LOGJP_{it} - 0.324 LOGTPAK_{it} - 0.252 LOGUMK_{it} + \epsilon_{it}$. Which proves that partially the population variable has a significant effect on the open unemployment rate, the labor force participation rate variable has no significant effect on the open unemployment rate, and the minimum wage variable has no significant effect on the open unemployment rate. Meanwhile, simultaneously a significant effect of 68 percent between the variables of population, labor force participation rate and minimum wage on the open unemployment rate.

The government is expected to be able to reduce the open unemployment rate by paying more attention to the population level which affects open unemployment, the need to reduce the population explosion by holding family planning socialization, the risk of marrying young in all regions is evenly distributed because if the population rate can be reduced then TPT can also be reduced by it can reduce the number of open unemployment in East Java Province.

Keywords: Open Unemployment Rate, Total Population, labor force participation rate, Minimum Wage

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	16
1.3 Tujuan Penelitian	16
1.4 Manfaat Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1 Landasan Teori.....	19
2.1.1 Teori Penduduk.....	19
2.1.2 Teori Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.....	23
2.1.3 Teori Upah	26
2.1.4 Teori Pengangguran	29
2.2 Penelitian Terdahulu	33
2.3 Hipotesis	42
2.4 Kerangka Konseptual.....	45
BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1 Jenis Penelitian.....	46
3.2 Tempat atau Lokasi Penelitian.....	47
3.3 Populasi Dan Sampel	47
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian.....	47
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	50
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	52

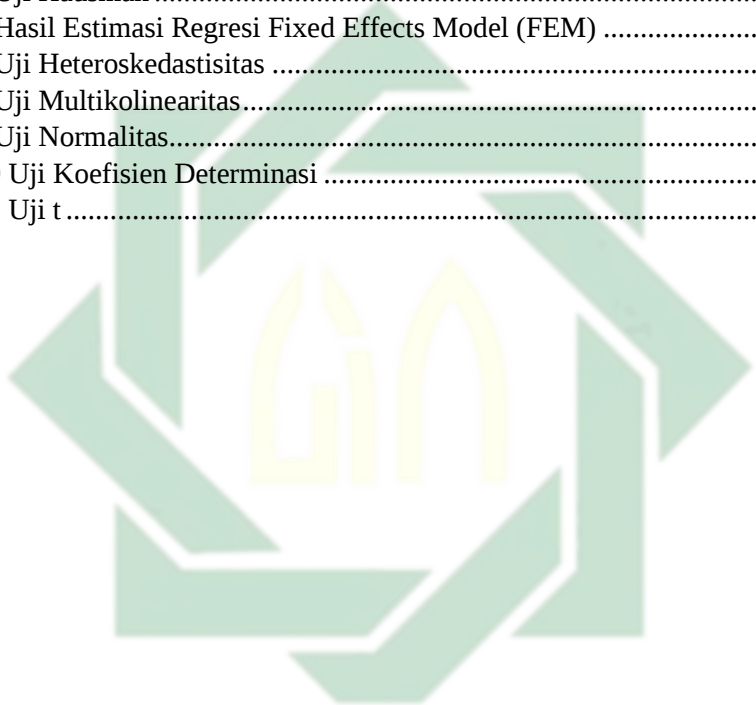
3.7 Teknik Analisis Data.....	52
3.7.1 Pemilihan Pendekatan Regresi Data Panel.....	54
1. Uji Chow	54
2. Uji Hausman.....	55
3.7.2 Estimasi Regresi Data Panel	55
3.7.3 Uji Asumsi Klasik	57
3.7.4 Pengujian Hipotesis	58
1. Koefisien Determinasi R^2	58
2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	59
3. Uji Statistik t	60
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	62
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	62
4.1.1 Gambaran Umum di Provinsi Jawa timur	62
4.1.2 Gambaran Umum Tingkat Pengangguran Terbuka (Y) di Jawa Timur	64
4.1.3 Gambaran Umum Jumlah Penduduk (X_1) di Jawa Timur.....	65
4.1.4 Gambaran Umum Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (X_2) di Jawa Timur.....	66
4.1.5 Gambaran Umum Upah Minimum (X_3) di Jawa Timur	66
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian.....	67
4.2.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	67
4.2.2 Hasil Uji Model Regresi Data Panel.....	69
1. Uji Chow	69
2. Uji Hausman.....	70
4.3 Analisis Model.....	70
4.3.1 Hasil Estimasi Regresi.....	70
4.3.2 Hasil Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik	71
1. Uji Heteroskedastisitas	72
2. Uji Multikolinearitas	73
3. Uji Normalitas	74
4.3.3 Hasil Uji Statistik Analisis Regresi	75
1. Koefisien Determinasi (R^2).....	75
2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	76
3. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)	76
4.4 Pembahasan	78

4.4.1 Pengaruh Secara Parsial Jumlah Penduduk, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur.....	78
1. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka	79
2. Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.....	82
3. Pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka	84
4.4.2 Pengaruh Secara Simultan Jumlah Penduduk, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur.....	88
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	91
5.1 Kesimpulan	91
5.2 Saran	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN	98

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

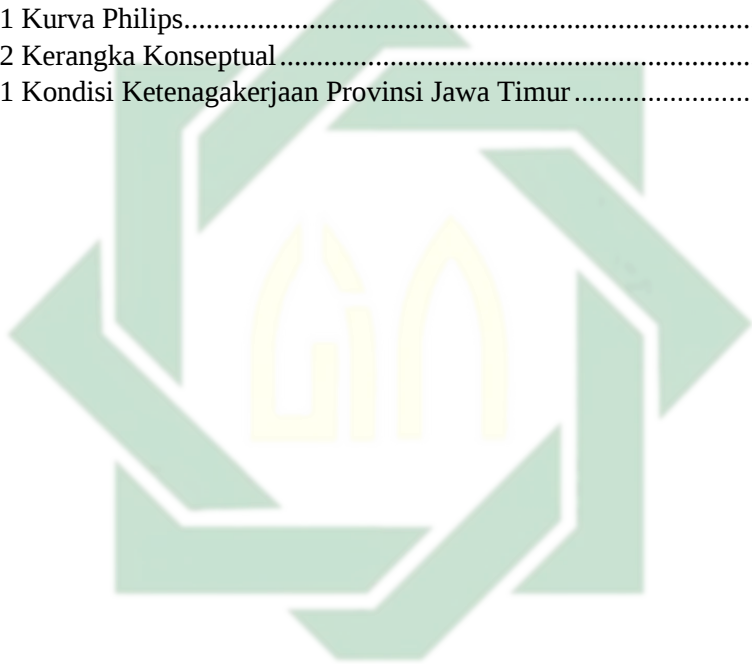
DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	33
Tabel 4. 1 Jumlah Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi di Pulau Jawa	62
Tabel 4. 2 Luas Wilayah Per-Provinsi di Pulau Jawa	63
Tabel 4. 3 Statistik Deskriptif	67
Tabel 4. 4 Uji Chow.....	69
Tabel 4. 5 Uji Hausman	70
Tabel 4. 6 Hasil Estimasi Regresi Fixed Effects Model (FEM)	71
Tabel 4. 7 Uji Heteroskedastisitas	72
Tabel 4. 8 Uji Multikolinearitas.....	74
Tabel 4. 9 Uji Normalitas.....	74
Tabel 4. 10 Uji Koefisien Determinasi	75
Tabel 4. 11 Uji t	77


 UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

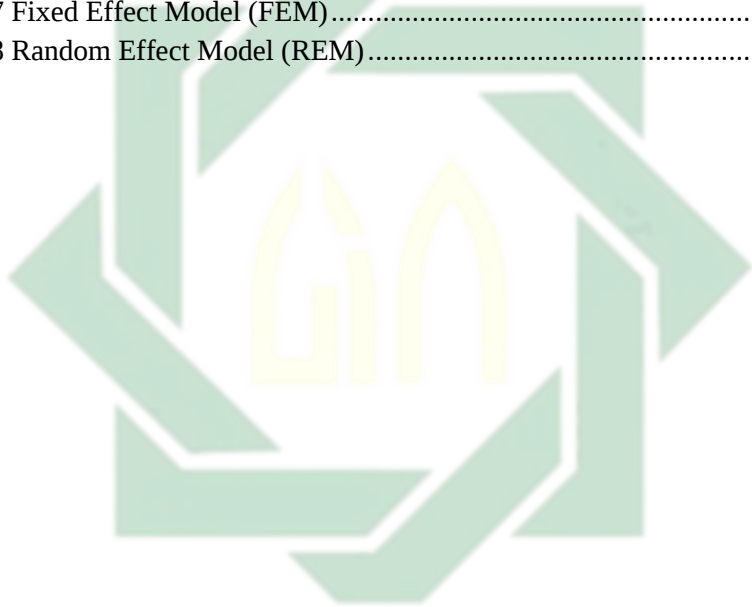
Gambar 1. 1 Tingkat Pengangguran Indonesia 2011-2020.....	3
Gambar 1. 2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Timur (Persen), Tahun 2011-2020	7
Gambar 1. 3 Jumlah Penduduk di Provinsi Jawa Timur (Jiwa).....	9
Gambar 1. 4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Timur	11
Gambar 1. 5 Upah Minimum Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2020	14
Gambar 2. 1 Kurva Philips.....	28
Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual.....	45
Gambar 4. 1 Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur	64



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2020	98
Lampiran 2 Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Timur.....	100
Lampiran 3 Data Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2011-2020.....	102
Lampiran 4 Data Upah Minimum di Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2011-2020	105
Lampiran 5 Data Logaritma Variabel Penelitian	107
Lampiran 6 Common Effect Model (CEM).....	117
Lampiran 7 Fixed Effect Model (FEM)	118
Lampiran 8 Random Effect Model (REM).....	118



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar. Di setiap tahunnya mengalami peningkatan penduduk yang signifikan (Badan Pusat Statistik, 2022). Dilihat dari sensus penduduk tahun 2020 mencapai 270,20 juta jiwa (BPS, 2021). Dan diperkirakan penduduk di Indonesia memasuki masa bonus demografi (BPS, 2022). Hal ini ditunjukkan dengan jumlah penduduk usia produktif yang mencapai dua kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lanjut usia (BPS, 2022). Jumlah penduduk usia produktif yang besar menyediakan sumber tenaga kerja, pelaku usaha, dan konsumen potensial yang sangat berperan dalam percepatan pembangunan.

Bonus demografi dapat diartikan sebagai kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif (penduduk usia kerja) lebih besar dibandingkan usia nonproduktif. Dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar, penyediaan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk kegiatan produktif menjadi mudah tercukupi. Namun, dikarenakan banyak penduduk usia produktif menjadikan pengangguran. Pengangguran ternyata menjadi penghambat bonus demografi. Di masa pandemi pada tahun 2020 tingkat pengangguran semakin tinggi. Banyak anak muda produktif yang terpaksa menganggur karena lowongan pekerjaan menurun di saat pandemi dan setelahnya (BPS, 2022).

Selain itu, risiko dari bonus demografi ini yaitu kurangnya pengelolaan dengan baik khususnya di bagian pengelolaan tenaga kerja. Kementerian

Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat bahwa penyerapan tenaga kerja pada tahun 2020 mencapai 1.156.361 tenaga kerja (BPS, 2022). Hal ini menunjukkan peningkatan sebesar 11,85% persen dari pencapaian tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 1.033.835 tenaga kerja (BPS, 2022).

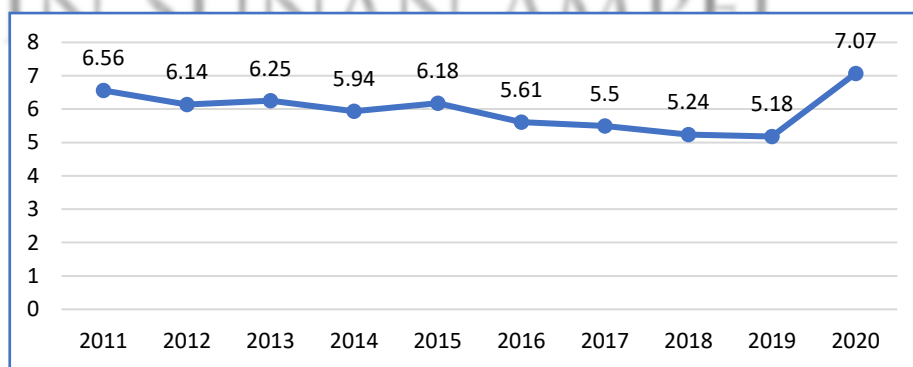
Dari penyerapan tenaga kerja tersebut salah satu risiko yaitu peningkatan penjumlahan TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) dampaknya terhambatnya laju pertumbuhan ekonomi. Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah Angkatan Kerja. Hal tersebut tantangan pemerintah kedepannya dalam menghadapi masa bonus demografi guna mengatasi Tingkat Pengangguran Terbuka. Dikhawatirkan apabila tidak segera diatasi, maka bonus demografi akan menimbulkan efek negatif terhadap pembangunan negara, dengan banyaknya usia produktif yang menganggur (Wati, 2022).

Negara Indonesia sendiri permasalahan yang kompleks atau masalah klasik yang dihadapi yaitu masalah pengangguran. Masalah pengangguran ini memang menjadi persoalan dan perlunya untuk diselesaikan dalam perekonomian di setiap negara-negara terutama Indonesia (Djohanputro, 2020). Pengangguran yang tinggi berdampak negatif terhadap perekonomian, individu serta masyarakat yang kurang mengoptimalkan pemanfaatan yang didapat dan turunnya produktivitas serta upah yang diperoleh dan menyebabkan kemiskinan serta masalah sosial. Tingkat pengangguran menunjukkan persentase dari angkatan kerja yang tidak bekerja. Tingginya tingkat pengangguran menunjukkan kegagalan dalam pembangunan. Selain karena pengangguran menyebabkan tidak tercapainya keluaran maksimum,

pengangguran juga berdampak langsung pada individu pencari kerja. Mereka yang menganggur secara ekonomi tidak memiliki sumber pendapatan untuk kehidupan. Hal tersebut berdampak pada masalah sosial, termasuk masalah kriminal dengan motif ekonomi (Djohanputro, 2020)

Pada Umumnya pengangguran penyebabnya dikarenakan jumlah tingkat partisipasi Angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan lapangan kerja. Terbatasnya lapangan kerja di Indonesia tiap tahunnya makin tinggi (Ishak K, 2020). Menurut Sadono Sukirno pengangguran merupakan keadaan seseorang dalam tahapan mencari pekerjaan, Tidak bekerja atau sedang berusaha mencari kerja namun belum mendapatkannya. Pengangguran merupakan angka yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah Angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan (Romadhon, 2022).

Di Indonesia Pengangguran mengalami fluktuasi. Berikut data tingkat pengangguran di Indonesia Tahun 2011-2020 :



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 1. 1 Tingkat Pengangguran Indonesia 2011-2020

Dari gambar 1.1, di atas terlihat jelas pengangguran di Indonesia yang mengalami angka tertinggi ada pada tahun 2020 sebesar 7,07% dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga, Dapat dikatakan selama 10 tahun pengangguran di Indonesia mengalami fluktuasi dan peningkatan yang signifikan di tahun 2020. Pengangguran melonjak tinggi di tahun 2020 sebesar 7.07 dikarenakan dampak dari adanya pandemi. Seperti yang dikemukakan oleh Sulistri Kawiyan sebagai fungsional pengantar kerja mengatakan bahwa tidak hanya tingkat pengangguran yang meningkat namun tingkat Pemberhentian Hak Kerja (PHK) juga melonjak tinggi setelah wabah Covid-19 ini menyerang (Dinas komunikasi dan informatika, 2020).

Dampak dari pandemi begitu besar bagi perekonomian masyarakat, sejak munculnya pandemi banyak karyawan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga berdampak pada peningkatan angka pengangguran dan pastinya melemahnya perekonomian keluarga (Diskominfo, 2020). Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, Jumlah PHK di Indonesia terus menurun sejak tahun 2014. Pada tahun 2018 jumlah PHK sekitar 3.400 tenaga kerja atau turun 95,67 persen dari tahun 2014. Namun, di tahun 2019 kembali naik 45.00 PHK. Dan di tahun 2020 meningkat sebesar 3,6 Juta (Wati, 2022).

Didalam negara berkembang yang dilihat adalah tingginya tingkat pengangguran. jikalau peningkatan pertumbuhan pengangguran diabaikan maka negara akan menimbulkan krisis yang disebabkan banyaknya rakyat dengan penghasilan dibawah rata-rata atau tidak berpenghasilan. Dengan itu agar negara

mampu lebih berkembang komponen yang harus diperhatikan yaitu tingkat penganggurannya. Jika permasalahan pengangguran tersebut belum bisa teratasi dengan baik otomatis pembangunan serta pertumbuhan ekonomi di suatu negara pun akan ikut berkembang (Zuliasari & Rachmawati, 2021).

Penyebab pengangguran yaitu karena jumlah Angkatan kerja ataupun para pencari kerja yang kurang sebanding dengan jumlah yang ada di lapangan kerjanya yang ada atau kurang mampu menyerapnya. Seringkali permasalahan pengangguran dalam perekonomian yang disebabkan karena tingginya pengangguran, produktivitas serta pendapatan masyarakat juga berkurang dan menimbulkan kemiskinan maupun masalah sosial lainnya (Romadhon, 2022).

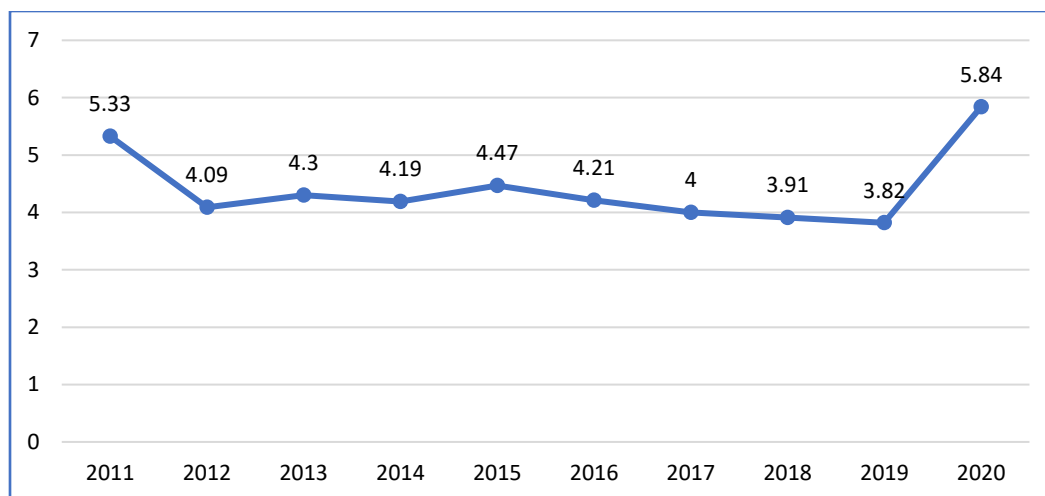
Menurut Putong menjelaskan, dalam analisis makro ekonomi kondisi yang diinginkan bukan bagaimana mempekerjakan secara *sporadic*, karena akan membahayakan situasi ekonomi dari sisi lainnya (Putong, 2019). Namun, dengan cara pada saat lowongan kerja di sediakan dalam jangka waktu tertentu dapat diisi oleh semua para pencari kerja. Kondisi saat lowongan kerja sudah terisi oleh pencari kerja, pada ilmu ekonomi disebut "*full employment*" (Zuliasari & Rachmawati, 2021). Namun, perlu diingat kondisi pekerjaan penuh bukanlah kondisi untuk tidak ada menganggur sama sekali.

Dikemukakan oleh Sukarno pengangguran merupakan masalah yang buruk efeknya dalam perekonomian dan masyarakat itu sendiri. Sukarno juga membedakan pengangguran berdasarkan cirinya (Sukarno, 2019). Pengangguran dibedakan menjadi empat kelompok yaitu pengangguran terbuka, pengangguran

tersembunyi, setengah menganggur dan pengangguran bermusim (Dainty et al., 2020).

Pada penelitian ini, yang akan dibahas adalah variabel-variabel pengaruh dalam pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka sendiri merupakan tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak punya pekerjaan. Menurut Badan Pusat Statistik mendefinisikan pengangguran terbuka yaitu seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan, masih mencari kerja, berusaha mempersiapkan usahanya serta yang tidak mencari kerja dikarenakan mereka memiliki pemikiran tidak akan pernah memperoleh pekerjaan serta yang sudah punya pekerjaan namun belum memulai bekerja (BPS, 2022).

Pengangguran terbuka ini cukup banyak dikarenakan belum mendapat pekerjaan meskipun sudah berusaha atau sedang berusaha secara maksimal serta dampak dari bertambahnya lowongan kerja yang masih rendah daripada pertambahan tenaga kerjanya (Wati, 2022). Efek dari pengangguran ini jangka masanya yang cukup Panjang karena mereka tidak melakukan pekerjaan, jadi mereka menganggur secara nyata atau paruh waktu. Di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Timur Tingkat pengangguran terbuka setiap tahunnya mengalami fluktuasi dari tahun 2011 sampai 2020 yang mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak stabil atau juga disebut keadaan yang tidak tetap atau berubah-ubah. Berikut data tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur :



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 1. 2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Timur (Persen), Tahun 2011-2020

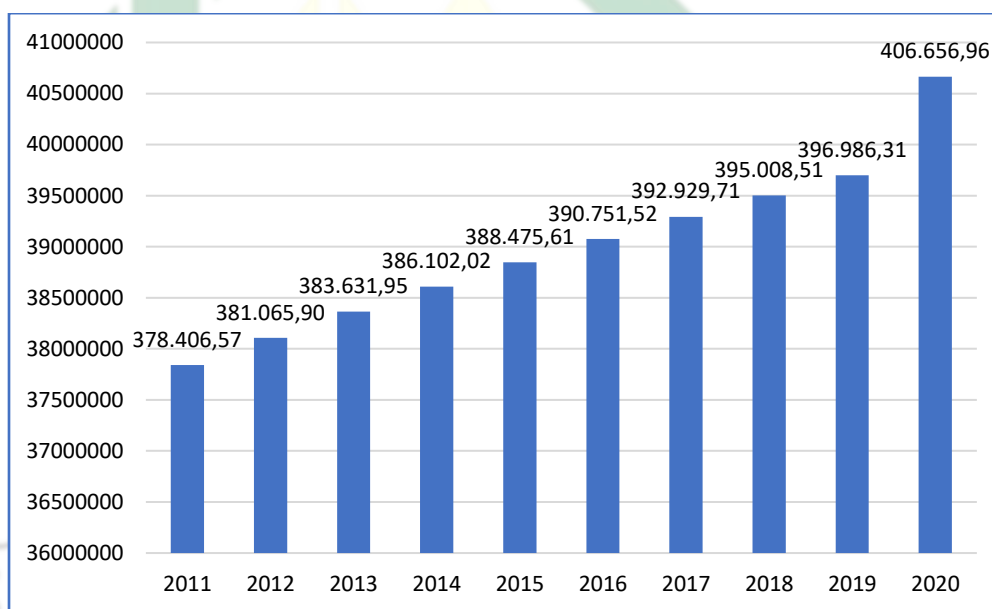
Dari gambar 1.2, sepuluh tahun terakhir mengalami fluktuasi. Terlihat jelas tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan akibat adanya pandemi Covid 19. Gambar 1.2 tersebut menggambarkan Pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang begitu signifikan yaitu sebesar 5,84% Jadi, dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 mengalami peningkatan pengangguran terbuka di provinsi Jawa Timur yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut menjadi sebuah permasalahan yang patut untuk diangkat pada penelitian ini terkait pengaruh tingkat pengangguran terbuka yang ada di Jawa Timur. Dikarenakan Angka yang paling tertinggi terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur di tahun 2020 dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 terdapat pandemi Covid 19 sehingga berdampak pada tingkat pengangguran terbuka khususnya di Jawa Timur.

Seperti yang dikemukakan oleh proyeksi Core Indonesia penambahan jumlah pengangguran terbuka yang signifikan bukan hanya disebabkan oleh perlambatan laju pertumbuhan ekonomi, melainkan disebabkan oleh perubahan perilaku masyarakat terkait pandemi Covid 19 dan kebijakan pembatasan sosial, baik dalam skala kecil maupun skala besar (Fahri et al., 2020). Begitu juga dengan Himawan Estu Bagijo selaku Kepala Disnakertrans Jawa Timur “melonjaknya angka pengangguran di Jatim adalah dampak dari adanya pandemi Covid 19” (Diskominfo, 2020).

Disisi lain, pengaruh variabel-variabel dalam ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka antara lain Jumlah penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja dan upah minimum. Negara Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar nomor empat di dunia. Menurut Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil mencatat jumlah penduduk Indonesia mencapai 273,87 juta jiwa (Setyaningsih, 2021).

Banyaknya jumlah penduduk menimbulkan beberapa masalah terutama dalam bidang ekonomi yaitu pengangguran. Seperti yang dikemukakan oleh Sukirno perkembangan jumlah penduduk dapat menimbulkan faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong banyaknya tenaga kerja yang disebabkan oleh perluasan pasar (Setyaningsih, 2021). Perluasan pasar dapat diakibatkan oleh total pendapatan masyarakatnya serta jumlah keseluruhan penduduk. Sedangkan untuk penduduk ini faktor penghambatnya dikarenakan penurunan produktivitas yang berdampak pada terdapat banyak pengangguran.

Jumlah penduduk yang bertambah tiap tahunnya akan mempengaruhi penambahan tingkat partisipasi Angkatan kerja dengan artian jumlah orang yang mencari kerja akan meningkat serta tenaga kerja pun juga bertambah. Pada kenyataannya peningkatan penduduk kota yang tidak dibarengi dengan peningkatan lapangan kerja sehingga mengakibatkan peningkatan pula pada jumlah penganggurannya (Diskominfo, 2020). Seperti halnya di Provinsi Jawa Timur Jumlah Penduduk yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, berikut datanya :



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 1. 3 Jumlah Penduduk di Provinsi Jawa Timur (Jiwa)

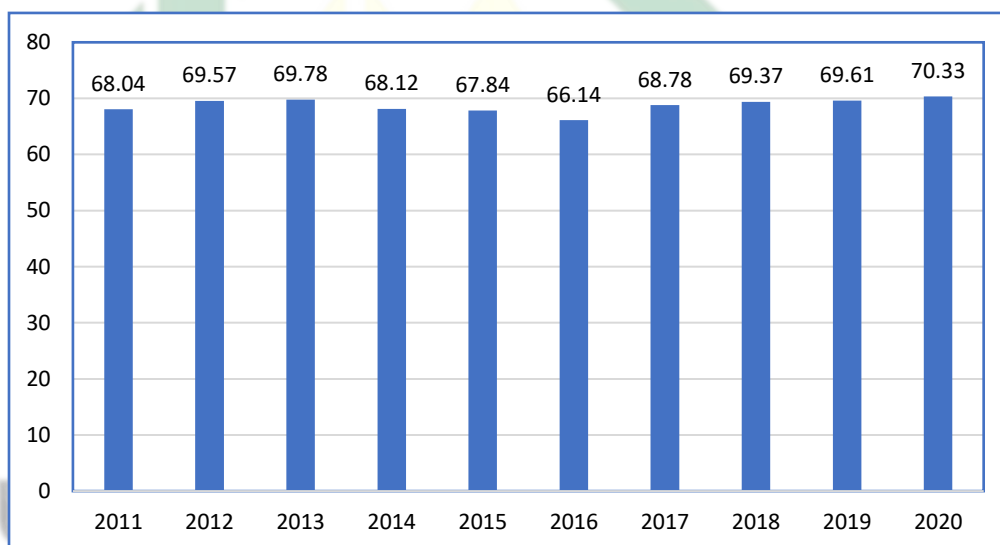
Dari gambar 1.3, terlihat jelas peningkatan yang signifikan dari tahun 2011 sampai 2020. Dari yang berkisar 378.406,57 jiwa ke 406.656,96 jiwa. Jadi, Penduduk yang ada di Provinsi Jawa Timur terus menerus mengalami kenaikan dari tahun 2011 sampai 2020. Perkembangan penduduk tiap tahunnya sangat mempengaruhi

angkatan kerja. Tiap naiknya Angkatan kerja yang berkelanjutan berdampak pada tingkat pengangguran yang meningkat menurut (Ma'arief, 2021).

Kemudian, perspektif dari merkantilisme pada teori kependudukan modern mengungkapkan jika jumlah penduduk begitu besar maka pentingnya kekuatan negara untuk pembangunan pendapatan, jadi apabila jumlah penduduk yang besar dapat mengimbangi dengan kemampuan serta pengupayaan dalam peningkatan efisiensi melalui lapangan kerja baru maka akan memberikan dampak positif bagi peningkatan pembangunan ekonomi daerah (Herman, 2019). Dikemukakan juga oleh Hartanto peningkatan jumlah penduduk yang ada di Indonesia terhadap tingkat penyebaran yang kurang merata dapat menimbulkan banyak permasalahan kependudukan yang sampai saat ini belum teratasi (Herman, 2019).

Relativanya jumlah penduduk mempengaruhi bertambahnya pengangguran di wilayah tersebut. Bertambahnya penduduk sama halnya dengan kenaikan tingkat partisipasi Angkatan kerja. Menurut Badan Pusat Statistik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas (BPS, 2022). Menurut Mulyadi, semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja semakin baik. Bila peningkatan tersebut seiring dengan bertambahnya partisipasi penduduk yang bekerja, namun jika yang terjadi justru sebaliknya tentu hal ini tidak baik. Dengan kata lain akan mengakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran yang disebabkan karena terbatasnya lapangan pekerjaan dalam menampung angkatan kerja (Badria, 2022).

Dengan itu tingkat partisipasi angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan ini pastinya membutuhkan lapangan pekerjaan. Namun kenyataannya atau realitanya tidak semuanya tingkat partisipasi angkatan kerja memperoleh pekerjaan (Diskominfo, 2020). Hal tersebutlah menjadikan pentingnya peranan dari pemerintahan di wilayah tersebut terkait dengan permasalahan tingkat Angkatan kerja khususnya di Jawa Timur, dan berikut data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja :



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 1. 4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Timur

Dari data tingkat jumlah penduduk dan tingkat partisipasi Angkatan kerja di Jawa Timur memperlihatkan bahwasanya apabila jumlah penduduk meningkat maka otomatis tingkat partisipasi angkatan kerja juga meningkat dan dari data tingkat partisipasi Angkatan kerja pada tahun 2011-2020 mengalami fluktuasi dan tidak stabil. Dan apabila dari pihak pemerintah kurang memperhatikan ketersediaan

lapangan pekerjaan maka otomatis peningkatan pengangguran terbuka akan meningkat (Diskominfo, 2020).

Pada gambar 1.4 diatas, menggambarkan tingkat partisipasi Angkatan kerja yang mendominasi di tahun 2020 sebesar 70,33% hal tersebut dikarenakan pada tahun 2020 musibah di seluruh dunia bahkan negara Indonesia pun juga yaitu Covid 19. Dengan adanya pandemi penyakit Covid-19 ini terpaksa beberapa perusahaan mengurangi jumlah pekerja atau karyawan sebagai akibatnya terjadi PHK. Dampak Covid 19 terhadap dunia ketenagakerjaan yaitu terjadinya kenaikan tingkat pengangguran, Terjadinya PHK Terhadap karyawan, Kesehatan mental pekerja serta penurunan tingkat produktivitas kerja saat WFH (*Work From Home*) (Dampak & Di, 2022). Di negara Indonesia sendiri banyak perusahaan yang nyatanya terpaksa mengurangi jumlah Karyawannya dikarenakan perusahaan tersebut bangkrut (Irwansyah, 2019).

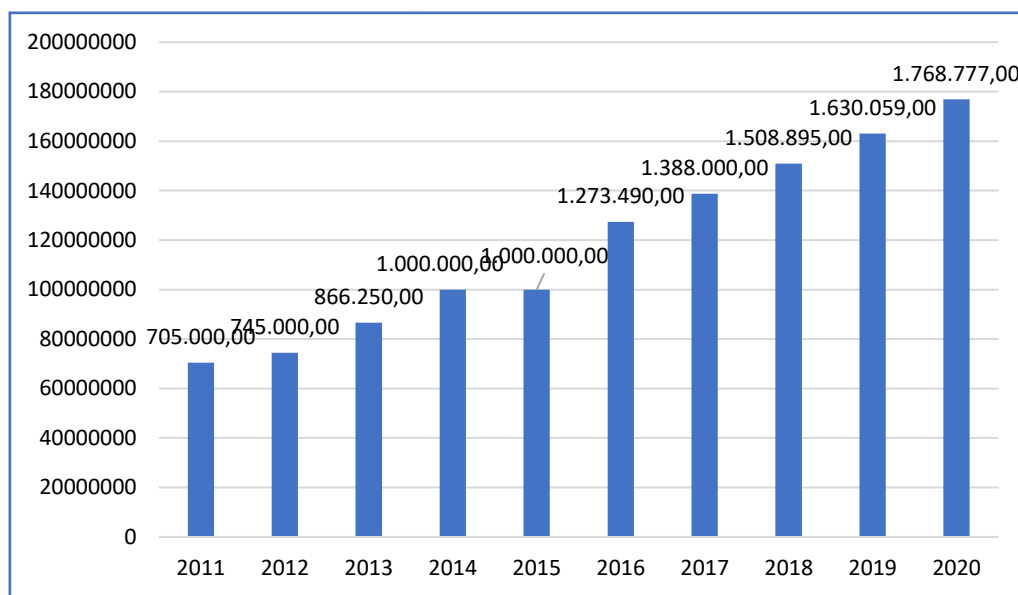
Disisi lain, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengalami dampak positif pada pasokan atau tenaga kerja dari bidang pertanian, kehutanan dan perikanan di provinsi Jawa Timur meningkat ditahun 2020 meskipun tidak sampai satu persen yaitu sebesar 70,33% meningkatnya sebesar 0,72% dibandingkan dengan bulan yang sama ditahun yang berbeda (Perdana, 2020). Hal tersebut kenaikan TPAK menurut dadang memberikan indikasi adanya kenaikan potensi ekonomi dari sisi pasokan atau (*supply*) tenaga kerja (Perdana, 2020). Menurutna kenaikan TPAK ini karena adanya kenaikan penduduk bekerja yang terserap di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Perdana, 2020).

Dapat disimpulkan juga tingkat pengangguran terbuka adalah cerminan belum berhasilnya pembangunan di daerah tersebut. Peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja baru yang besarnya lebih besar dibanding lapangan kerja yang disediakan terus menunjukkan jurang (*gap*) yang terus besar. Kondisi tersebutlah menyebabkan pemutusan hubungan kerja. Sehingga tingkat pengangguran di Indonesia khususnya Jawa Timur dari tahun ke tahun meningkat (Herman, 2019).

Variabel lain yang dipengaruhi oleh tingkat pengangguran terbuka adalah upah minimum. Penentuan upah yang tinggi dapat menyebabkan kenaikan harga-harga yang ada di pasaran, dengan itu timbulah inflasi. Upah minimum merupakan standar minimum untuk para pekerja supaya mereka tidak mendapat upah yang lebih rendah dan mendapat kesetaraan yang sudah dilakukannya (Herman, 2019). Tiap tahunnya pemerintah di Indonesia selalu meningkatkan upah minimum di tiap-tiap daerah khususnya di Jawa Timur.

Harapan peningkatan upah ini agar para pekerja dapat meningkatkan juga kualitas kerjanya dan meningkatkan standar hidup lebih layak dari tahun sebelumnya (Herman, 2019). Namun, dengan adanya kenaikan upah minimum tiap tahunnya justru menimbulkan penurunan permintaan pada tenaga kerja, sebaliknya dari pihak kerja upah merupakan hal yang seharusnya memang diterima sebagai ganti waktu serta tenaganya yang sudah terkuras (Herman, 2019). Pemanfaatan upah UMR yakni sebagai standar untuk memberikan upah yang layak kepada para pekerja. Sedangkan bagi karyawan upah minimum regional adalah untuk menghindari dari upah yang terlalu rendah serta yang tidak sebanding dengan kerja

keras mereka saat bekerja. Upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah dari tahun 2011 sampai 2020 mengalami kenaikan per tahunnya, berikut data upah minimum di Provinsi Jawa Timur :



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 1. 5 Upah Minimum Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2020

Pada gambar 1.5, terlihat sangat jelas di tahun 2011 sampai 2020 mengalami peningkatan yang begitu signifikan. Dari yang tahun 2011 sekitar Rp. 705.000,00 sampai di tahun 2020 menjadi Rp. 1.768.777,00. Makin tinggi upah minimum berdampak pula terhadap penurunan permintaan tenaga kerja (Setyaningsih, 2021). Menurut Simanjuntak kenaikan tingkat upah akan diikuti dengan turunnya tenaga kerja yang dimintai dengan demikian akan bertambah pengangguran khususnya di Provinsi Jawa Timur (Setyaningsih, 2021). Sedangkan, menurut Keynes menyampaikan bahwa kenaikan dalam kesempatan kerja hanya bisa terjadi bila tingkat upah turun. Tetapi disisi lain jika upah rendah maka minat masyarakat untuk bekerja akan menurun (Badria, 2022).

Sedangkan di kondisi sekarang ini khususnya di Jawa Timur meningkatnya upah maka memberikan dorongan untuk mencari pekerjaan atau bekerja oleh penduduk semakin banyak sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran (Suriati, 2020). Seperti yang dikemukakan oleh W Phillips upah memiliki pengaruh negatif terhadap pengangguran, yaitu ketika pengangguran tinggi upah berada pada tingkat yang rendah (Suriati, 2020). Jadi, dalam teori Phillips Kenaikan upah minimum setiap tahunnya dapat mengurangi jumlah pengangguran terbuka. Dan jika penurunan upah akan berdampak pada kenaikan jumlah pengangguran (Suriati, 2020).

Proses pengukuran maju mundurnya suatu perekonomian serta pembangunan di suatu negara, dapat dilihat melalui jumlah pengangguran yang ada di negara tersebut, dikarenakan pengangguran dedikasikan parameternya kesejahteraan atau tidak pada penduduk di suatu negara (Djohanputro, 2020). Di Indonesia, khususnya Jawa Timur pengangguran merupakan masalah yang sangat penting untuk diselesaikan mengingat angkanya terhadap tingkat pengangguran yang mengalami peningkatan di tiap tahunnya khususnya di tahun 2020. Jika di tahun 2020 terdapat musibah pandemic Covid 19 terdapat keterbatasan untuk keluar rumah dikarenakan aturan dari pemerintah sehingga kenaikan pengangguran di tahun 2020 melonjak tinggi dibandingkan tahun sebelum-sebelumnya.

Dari peningkatan tingkat pengangguran yang diikuti dengan bertambahnya jumlah penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja serta kenaikan upah minimum. Dapat disimpulkan bahwa angka pengangguran yang rendah dapat mencerminkan

pertumbuhan ekonomi yang baik serta dapat mencerminkan adanya peningkatan kualitas taraf hidup penduduk dan peningkatan pemerataan pendapatan, Oleh karena itu kesejahteraan penduduk meningkat (Farid, 2017) .

Dari penjelasan diatas terkait dengan tingkat pengangguran terbuka, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh tiga variabel terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur Dengan judul penelitian “**Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2011-2020**”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas, dengan itu rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Jumlah Penduduk, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Upah Minimum berpengaruh secara parsial terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2011-2020?
2. Apakah Jumlah Penduduk, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Upah Minimum berpengaruh secara simultan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2011-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang sudah disebutkan, dengan itu tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk Mengidentifikasi Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Upah Minimum secara parsial terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2011-2020.
2. Untuk Mengidentifikasi Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Upah Minimum secara simultan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2011-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk para pembaca baik bagi para mahasiswa dan bagi peneliti lain diantaranya sebagai berikut :

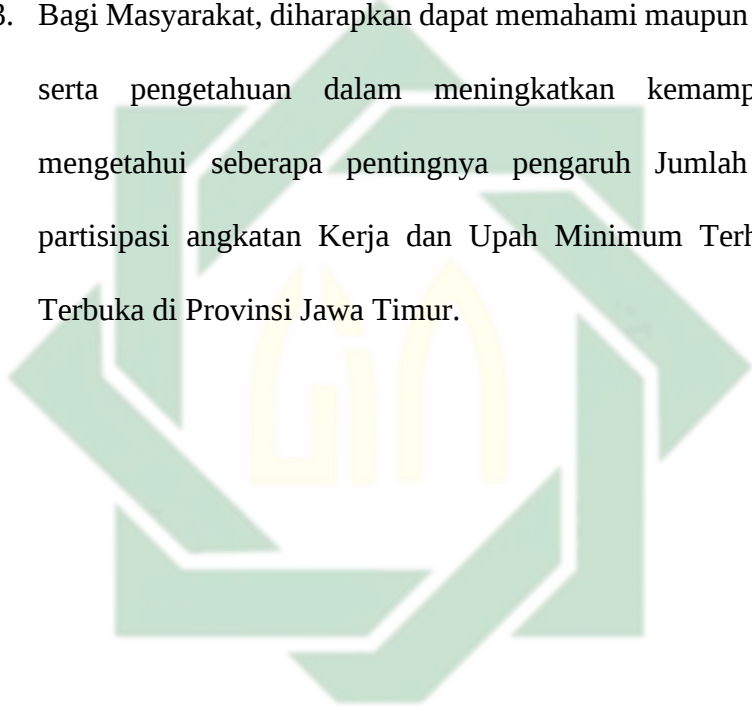
1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini memberikan manfaat dalam pengembangan Ilmu Ekonomi dan juga pemahaman, wawasan secara mendalam terkait dengan teori ekonomi serta penganalisisan ekonomi khususnya pada Pengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka yang ada di Provinsi Jawa Timur. Tentu juga harapan dalam penelitian ini dijadikan sebagai referensi atau rujukan dalam Ilmu Ekonomi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, diharapkan dapat memberikan wawasan baru, pengalaman serta pengetahuan yang cukup bagi penulis dan peneliti selanjutnya.

2. Bagi Pemerintah, diharapkan dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan persoalan tingkat pengangguran terbuka yang ada di Provinsi Jawa Timur kedepannya.
3. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat memahami maupun menambah wawasan serta pengetahuan dalam meningkatkan kemampuannya agar bisa mengetahui seberapa pentingnya pengaruh Jumlah Penduduk, tingkat partisipasi angkatan Kerja dan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Penduduk

Penduduk merupakan banyaknya orang yang domisili di wilayah geografis di Indonesia kisaran enam bulanan atau lebih serta yang domisili kurang dari enam bulan namun dengan tujuan menetap (Saraswati, 2018). Penduduk ialah unsur penting dalam aktivitas ekonomi dan tenaga kerja, tenaga ahli, pimpinan perusahaan tenaga kerja usahawan untuk menciptakan kegiatan perekonomian. Penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan ekonomi serta tenaga kerja, tenaga ahli, pimpinan perusahaan tenaga kerja usahawan dalam menciptakan kegiatan ekonomi.

Adioetomo teori konfusius membahas pengaruh antara jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Menurutnya jumlah penduduk yang terlampau besar akan menekan standar hidup masyarakat, terutama jika jumlah penduduk di kaitkan dengan luas tanah atau lahan pertanian yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan penduduk (Saraswati, 2018). Konfusius menganggap ada suatu proporsi yang ideal antara luas tanah dan jumlah penduduk. Sebagai pemecah masalah kelebihan penduduk, ia menganjurkan agar pemerintah memindahkan penduduk ke daerah yang masih kekurangan penduduk (Saraswati, 2018).

Menurut beliau jumlah penduduk yang terlalu melampaui batas maka akan menekan standar hidup masyarakat. Jumlah penduduk senantiasa berubah ubah dalam waktu ke waktu. Dengan naiknya jumlah penduduk maka terjadilah kepadatan penduduk disuatu wilayah tersebut. Kepadatan penduduk merupakan jumlah penduduk di suatu daerah persatuan luas. Kepadatan penduduk di suatu wilayah dapat dirumuskan dengan :

$$\text{Kepadatan Penduduk} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Total}}{\text{Luas Wilayah}}$$

Dari jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya yang menjadi permasalahan penduduk yang mengakibatkan hambatan dalam laju perekonomian. Laju pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menunjukkan persentase penambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu (Saraswati, 2018). Fungsinya merupakan untuk memprediksi jumlah penduduk dalam suatu wilayah di masa yang akan datang. Laju pertumbuhan geometrik menggunakan asumsi bahwasanya laju pertumbuhan penduduk sama setiap tahunnya. Rumus laju pertumbuhan penduduk geometris adalah sebagai berikut :

$$P_t = P_0 (1+r)^t$$

Keterangan :

P_t = Jumlah Penduduk pada tahun t

P_0 = Jumlah Penduduk Pada Tahun Dasar

t = Jangka Waktu

r = Laju Pertumbuhan Penduduk

Dikemukakan oleh Permadi dan Chrystanto peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya mengalami kenaikan yang pesat, dengan bertambahnya jumlah penduduk akan selalu dibarengi dengan muncul permasalahan yang diakibatkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang dinamis. Tingginya pertumbuhan penduduk dan peningkatan kegiatan serta aktivitas dalam berbagai sektor-sektor dapat menimbulkan permasalahan khususnya di Indonesia (Permadi dan Chrystanto, 2021).

Menurut Sukirno yang mengutip dari pendapat Nelson dan Leibsten menerangkan bahwasanya terdapat pengaruh langsung antar penambahan jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, lebih lagi Nelson dan Leibsten menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk yang signifikan di negara-negara berkembang menyebabkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang sulit mengalami perbaikan yang berarti dalam jangka panjangnya akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat serta tingkat jumlah masyarakat miskin (Sukarno, 2020).

Peningkatan jumlah penduduk yang terlalu tinggi menyebabkan penghambatan proses pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang. Pendapatan perkapita yang rendah dan tingkat pengembalian modal yang rendah akan semakin menyulitkan negara berkembang untuk menopang ledakan penambahan jumlah penduduk, walaupun output produksi meningkat sebagai hasil kemajuan teknologi yang lebih baik, peningkatan ini akan dimakan dan tidak kentara karena disebabkan pertumbuhan jumlah penduduk yang terlalu besar,

alhasil tidak ada perbaikan signifikan dalam laju pertumbuhan yang nyata bagi perekonomian negara (Permadi & Chrystanto, 2021).

Dalam teori penduduk terdapat beberapa teori pertumbuhan penduduk dalam ekonomi. Pertumbuhan penduduk merupakan aktivitas urbanisasi yang dilakukan masyarakat kota atau masyarakat kecil. Hal tersebut berdampak pada permasalahan penduduk yang mengakibatkan hambatan dalam laju perekonomian (Saraswati, 2018).

Pertama, Menurut Adam Smith dan David Ricardo berpendapat bahwasanya kenaikan pengangguran disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk dikarenakan kedudukan penduduk memiliki fungsi tenaga kerja dengan itu penduduk banyak tanpa adanya penyediaan lapangan kerja yang tidak diimbangi sehingga berakibat pada pengangguran yang banyak pula (Kosanke, 2019).

Kedua, Teori kependudukan dari Malthus, menyatakan bahwa semakin pesatnya jumlah penduduk akan menghasilkan tenaga kerja yang semakin banyak pula, namun hal ini tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang ada. Karena jumlah kesempatan yang sedikit itulah maka manusia saling bersaing dalam memperoleh pekerjaan dan yang tersisih dalam persaingan tersebut menjadi golongan penganggur (Kosanke, 2019).

Ketiga, teori aliran Marxist (Karl & F. Angel). Menurut Marxist tekanan penduduk di suatu negara bukanlah tekanan penduduk terhadap bahan makanan, tetapi tekanan terhadap kesempatan kerja (misalnya di negara kapitalis). Marxist juga berpendapat bahwa semakin banyak jumlah manusia semakin tinggi produk

yang dihasilkan, jadi dengan demikian tidak perlu diadakan pembatasan penduduk (Saraswati, 2018). Marxist juga berpendapat bahwa semakin banyak jumlah manusia semakin tinggi produk yang dihasilkan, jadi dengan demikian tidak perlu diadakan pembatasan penduduk. Berikut beberapa pendapat aliran Marxis : Populasi manusia tidak menekan makanan, tapi mempengaruhi kesempatan kerja, Kemelaratan bukan terjadi karena cepatnya pertumbuhan penduduk, tapi karena kaum kapitalis mengambil sebagian hak para buruh dan Semakin tinggi tingkat populasi manusia, semakin tinggi produktifitasnya, jika teknologi tidak menggantikan tenaga manusia sehingga tidak perlu menekan jumlah kelahirannya (Saraswati, 2018).

2.1.2 Teori Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Istilah partisipasi angkatan kerja berbeda dari istilah partisipasi kerja. Partisipasi angkatan kerja berarti keikutsertaan dalam atau menjadi angkatan kerja. Jadi, tingkat partisipasi angkatan kerja (*labor force participation rate*) menunjuk kepada persentase jumlah penduduk usia kerja yang termasuk dalam angkatan kerja. Sebaliknya partisipasi kerja berarti keikutsertaan dalam atau mempunyai pekerjaan. Jadi, tingkat partisipasi kerja menunjuk kepada persentase jumlah angkatan kerja yang mempunyai pekerjaan (*employment rate*) (Badria, 2022).

Menurut Badan Pusat Statistik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas (BPS, 2022). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) ditunjukkan pada pengukuran proporsi penduduk usia

kerja dengan aktif keterlibatannya melalui pasar tenaga kerja baik bekerja atau sedang pencarian kerja. TPAK dinyatakan untuk seluruh tenaga kerja yang ada ataupun penjumlahan tenaga kerja menurut pengelompokan umur tertentu, jenis kelamin, tingkat pendidikan maupun desa-kota.

Menurut Sukirno pengangguran terbuka merupakan Angkatan kerja yang siap untuk bekerja namun tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan, yang sedang mendirikan sebuah usaha atau orang yang belum mulai bekerja (Faizah & Woyanti, 2023). Angkatan kerja yang dengan memakai salah satu indikator tingkat partisipasi Angkatan kerja sebagai salah satu alat ukur untuk menghitung pengaruh tingkat partisipasi Angkatan kerja terhadap pengangguran terbuka yang dimana semakin tinggi tingkat partisipasi Angkatan kerja semakin baik jika diiringi dengan bertambahnya partisipasi penduduk yang bekerja. Yang artinya semakin tinggi angka tingkat partisipasi Angkatan kerja akan menurunkan angka pengangguran (Faizah & Woyanti, 2023).

TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja atau jumlah tenaga kerja (Alghofari, 2020). TPAK mengindikasikan besaran ukuran relatif penawaran tenaga kerja (*labour supply*) yang terlibat dalam produksi barang maupun jasanya melalui suatu perekonomian (Alghofari, 2020). Secara umum, TPAK didefinisikan sebagai ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 penduduk usia kerja (Mulyadi, 2020). Untuk menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{TPAK} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}} \times 100\%$$

Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja adalah angka perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja yang biasanya dinyatakan dalam persentase (Badria, 2022).

Menurut Simanjuntak (1998) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Tenaga Kerja antara lain (Wahyuningtias, 2019):

1. Jumlah Penduduk yang masih bersekolah

Semakin bertambahnya jumlah penduduk yang bersekolah, maka jumlah angkatan kerja semakin kecil yang selanjutnya berdampak pada TPAK yang juga semakin kecil. Penyediaan fasilitas pendidikan, kondisi dan penghasilan keluarga memberikan pengaruh pada jumlah penduduk yang memutuskan untuk bersekolah.

2. Jumlah Penduduk yang mengurus rumah tangga

Angka TPAK akan semakin kecil jumlahnya ketika semakin banyak tiap-tiap anggota keluarga yang mengurus rumah tangga.

3. Umur

Penduduk laki-laki terutama yang berumur 25-55 tahun umumnya dituntut menafkahi keluarganya sehingga TPAK relatif besar. Sedangkan penduduk yang berusia lebih dari 55 tahun cenderung menurunkan TPAK karena pada usia dini produktifitas kerja menurun dari adanya keputusan untuk pensiun.

4. Tingkat Pendidikan

Semakin tinggi kualitas atau jenjang pendidikan individu, maka akan membuat kesempatan bekerja semakin luas. Sehingga pada akhirnya TPAK akan cenderung mengalami kenaikan.

5. Upah

Semakin tinggi upah di pasar tenaga kerja, semakin banyak keputusan anggota yang tertarik masuk pasar kerja.

2.1.3 Teori Upah

Upah merupakan pendapatan yang diterima oleh para pekerja tenaga kerja dengan bentuknya uang yang mencakup lembur serta tunjangan yang diterimanya (Alghofari, 2020). Adapun dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan upah didefinisikan sebagai hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan (Setyowati, 2022).

Pemberian upah sebagai perwujudan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2), yaitu setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Oleh karena itu, sebagai upaya pemerintah untuk memenuhi penghidupan yang layak bagi buruh. Dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan memuat beberapa kebijakan pengupahan yang meliputi salah satunya upah minimum (Setyowati, 2022).

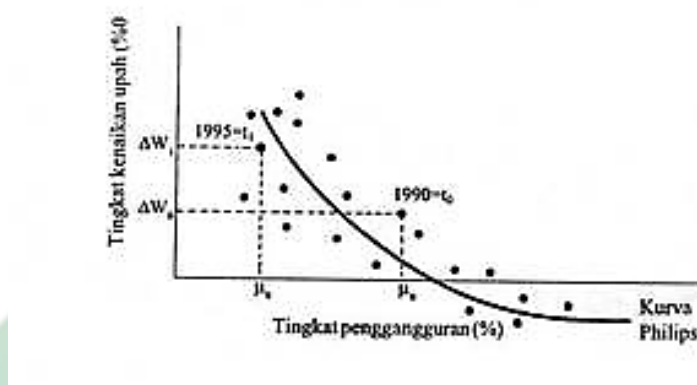
Kebijakan pengupahan dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan kehidupan yang layak bagi buruh. Dengan kebijakan pengupahan yang dibuat pemerintah tersebut diharapkan dapat melindungi buruh agar buruh dapat memenuhi kebutuhannya sendiri maupun keluarganya. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum menjelaskan bahwa upah minimum adalah upah sebulan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman (Ramadhani, 2020).

Selain itu upah minimum merupakan ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai keharusan perusahaan untuk membayar upah kepada pekerja/buruh yang paling rendah tingkatnya yang merupakan perlindungan bagi kelompok pekerja lapisan bawah atau pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja maksimal 1 (satu) tahun, agar memperoleh upah serendah-rendahnya sesuai dengan nilai kebutuhan hidup minimum (Ramadhani, 2020).

Kebijakan upah minimum telah menjadi isu yang sangat penting dalam masalah ketenagakerjaan di beberapa negara, baik itu di negara maju maupun di negara berkembang seperti Indonesia. Sasaran dari kebijakan upah minimum yaitu untuk menutupi kebutuhan hidup minimum para pekerja dan keluarganya (Ramadhani, 2020).

Dalam teori upah terdapat pengaruh upah dengan pengangguran terbuka, **Pertama** dalam Teori W Phillips yang menyebutkan bahwa ketika upah tinggi pengangguran berada pada tingkat yang rendah. Kurva Phillips merupakan hubungan terbalik antara tingkat pengangguran dan tingkat kenaikan upah

nominal. Semakin tinggi tingkat pengangguran, maka semakin rendah tingkat inflasi upah (Mankiw, 2019). Adanya *tradeoff* antara inflasi upah dan pengangguran. Dan berikut dengan kurva Phillips :



Sumber : Mankiw, 2019

Gambar 2. 1 Kurva Philips

Dari gambar diatas menjelaskan implikasi adanya *TradeOff* antara inflasi upah dan pengangguran. Sumbu vertikal (*wages*). Sumbu horizontal adalah tingkat pengangguran, jadi upah Philips memiliki hubungan terbalik jika *W* yang melambangkan upah meningkat pengangguran menurun. Jadi memiliki arah tanda negatif (Mankiw, 2019).

Kurva Philips menunjukkan bahwa upah menurun seiring dengan kenaikan tingkat pengangguran. Jika w_t adalah upah periode sekarang, dan w_{t+1} adalah upah periode berikutnya, maka tingkat inflasi upah, didefinisikan sebagai berikut (Ramadhani, 2020):

$$g_w = \frac{w_{t+1} - w_t}{w_t}$$

kemudian, u^* menggambarkan tingkat pengangguran alamiah sehingga dapat Menyusun kurva Phillips sebagai berikut :

$$g_w = -e(u - u^*)$$

Dimana e merupakan tingkat responsive upah terhadap pengangguran. persamaan ini menyatakan bahwa upah turun Ketika tingkat pengangguran melebihi tingkat pengangguran alamiah ($u > u^*$) , selisih antara $u - u^*$ disebut *unemployment gap*. Umpamanya perekonomian berada dalam kondisi keseimbangan dengan harga stabil dan tingkat pengangguran pada tingkat alamiah. Terjadi kenaikan stok uang yang beredar, katakanlah sebesar 10 persen. Baik harga maupun upah naik 10 persen sehingga perekonomian Kembali pada keseimbangan 10 persen. Tingkat pengangguran akan turun. Ini akan menyebabkan tingkat upah bergerak naik. Upah mulai bergerak naik, harga pun naik dan akhirnya perekonomian akan Kembali ke tingkat *full employment* dari output dan pengangguran (Ramadhani, 2020).

$$W_{t-1} = W_t[(1 - e(u - u^*))]$$

Menggunakan persamaan diatas, tingkat upah relatif terhadap tingkat upah sebelumnya. Agar upah naik melewati tingkat sebelumnya, pengangguran harus turun di bawah tingkat alamiahnya (Ramadhani, 2020).

2.1.4 Teori Pengangguran

Menurut Badan Pusat Statistik pengangguran merupakan penduduk yang belum bekerja namun sedang mencari kerja ataupun sedang mempersiapkan suatu usahanya dan juga penduduk yang tidak sedang mencari kerja dikarenakan sudah diterima bekerja namun belum memulainya. Mankiw berpendapat jika

pengangguran pastinya akan muncul dalam perekonomian dengan beberapa alasan (Mankiw, 2019). Pertama, adanya proses pencarian kerja merupakan dibutuhkan waktu yang cocok untuk para pekerja dan pekerjaannya. Kedua, adanya kekakuan upah, kekakuan ini disebabkan oleh tiga hal yaitu kebijakan upah minimum, daya tawar kolektif dari serikat pekerja serta upah efisiensi (Irwansyah, 2019).

Menurut Mankiw Pengangguran yaitu sebuah masalah makro ekonomi yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia secara langsung. Kebanyakan orang kehilangan suatu pekerjaan adalah turunnya standar hidupnya (Mankiw, 2019). Untuk mengukur tingkat pengangguran disuatu wilayah tersebut terdapat dua pendekatan sebagai berikut :

1. Pendekatan Angkatan Kerja (*Labour Force Approach*)

Besar kecilnya tingkat pengangguran dapat dihitung berdasarkan persentase serta perbandingan jumlah antara orang yang menganggur dan jumlah Angkatan kerja seperti rumusnya :

$$\text{Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah Yang Menganggur}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

2. Pendekatan pemanfaatan tenaga kerja (*Labour Utilization Approach*)

1. Bekerja penuh merupakan orang-orang yang bekerja penuh dengan jam kerjanya 35 jam per minggu.
2. Setengah menganggur merupakan mereka yang bekerja namun belum dimanfaatkan penuh atau jam kerjanya dalam seminggu kurang dari 35 jam.

Menurut Sadono Sukirno pengangguran dibagi menjadi empat bagian berdasarkan cirinya sebagai berikut (Romadhon, 2022):

1. Pengangguran Terbuka

Pengangguran ini merupakan tenaga kerja yang tidak mempunyai kerja. Pengangguran ini yang masih belum mendapatkan pekerjaan padahal sudah berusaha mencari pekerjaan hal tersebut karena bertambahnya lowongan kerja yang rendah daripada penambahan tenaga kerjanya. Efeknya pun jangka Panjang dikarenakan tidak melakukan pekerjaan. Sehingga mereka menganggur secara nyata atau separuh waktunya dengan itu disebut pengangguran terbuka. Terciptanya pengangguran terbuka dikarenakan bertambahnya lowongan pekerjaan yang rendah dari pada tenaga kerjanya (Romadhon, 2022).

2. Pengangguran tersembunyi

Pengangguran ini merupakan tenaga kerja cara optimal tidak bekerja disebabkan alasan tertentu, salah satunya kecilnya perusahaan dan juga tenaga kerja yang terlalu banyak sehingga untuk menjalankannya tidak efisien. Kelebihannya tenaga kerja yang dipergunakan merupakan golongan pengangguran tersembunyi (Romadhon, 2022).

3. Setengah Menganggur

Maksudnya adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal dikarenakan belum ada lapangan pekerjaan. Tenaga kerja setengah menganggur ini adalah tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam

seminggu. Biasanya bekerja dalam dua hari selama seminggu ataupun empat jam dalam sehari (Romadhon, 2022).

4. Pengangguran Musiman

Pengangguran ini yang tidak bekerja disebabkan oleh terikatnya pada musim tertentu. Rata-rata pengangguran ini di bidang pertanian atau perikanan. Umumnya, petani tidak begitu aktif antara sesudah menanam dan panen. Jikalau pada masa tersebut tidak melakukan pekerjaan maka mereka secara otomatis menganggur (Romadhon, 2022).

Kemudian, dalam teori pengangguran ada beberapa teori dalam Ilmu Ekonomi yaitu **Pertama**, Teori Malthus menyatakan bahwa semakin pesatnya jumlah penduduk akan menghasilkan tenaga kerja yang semakin banyak pula, namun hal ini tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang ada. Karena jumlah kesempatan yang sedikit itulah maka manusia saling bersaing dalam memperoleh pekerjaan dan yang tersisih dalam persaingan tersebut menjadi golongan penganggur (Irwansyah, 2019). **Kedua**, Teori Adam Smith dan David Ricardo berpendapat bahwa peningkatan pengangguran di suatu daerah disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk, karena penduduk juga berfungsi sebagai tenaga kerja, maka ketika penduduk yang banyak tanpa ada penyediaan/tersedianya lapangan pekerjaan yang banyak pula akan menyebabkan pengangguran yang banyak (Irwansyah, 2019).

2.2 Penelitian Terdahulu

Dari berbagai penelitian yang terkait dengan Pengaruh Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka. Maka berikut adalah beberapa hasil penelitian terdahulu yang dapat mendukung dalam penelitian ini yang berkaitan dengan Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul dan Tahun	Metode Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Fajar Rini Suhadi dan Eni Setyowati (Setyowati, 2022)	Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum, Dan PDRB Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Barat (2022)	Metode Kuantitatif	Menggunakan metode data panel dengan menggunakan software eviews 10	Dari hasilnya disimpulkan bahwa secara parsial Pendidikan, Upah Minimum dan Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka, sedangkan pada variabel Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap variabel Tingkat Pengangguran Terbuka. Pengaruh simultan variabel Pendidikan, Upah Minimum dan Produk Domestik Regional Bruto signifikan sebesar 92,51% dan sisanya 7,49% dipengaruhi oleh faktor lain yang	Persamaan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan analisis regresi data panel dan sama-sama menggunakan variabel independen Jumlah Penduduk dan Upah Minimum dan Variabel Dependen Pengangguran Terbuka. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada wilayahnya penelitian ini di Provinsi Jawa Barat.

					tidak di masukan dalam model. Penelitian ini diharapkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperhatikan hal-hal yang mempengaruhi tingkat Pengangguran terbuka di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.	
2	Putri Ariski Fauzi (Sheila Maria Belgis Putri Affiza, 2022b)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) dan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPK) SMK di Jawa Timur Tahun 2012-2020 (2022)	Metode kuantitatif	Menggunakan Eviews 9 dengan teknik <i>time series</i>	Dari penelitian yang dilakukan, maka diperoleh persamaan regresi yaitu $Y = 17,19857 - 0,565523 X_1 - 3,70E-06 X_2$. Secara parsial, pertumbuhan ekonomi (PDRB) berpengaruh negatif signifikan dengan nilai probabilitas 0.0267 dan nilai t hitung sebesar - 2.918655. Serta variabel upah minimum berpengaruh negatif tidak signifikan dengan nilai Probabilitas 0.0524 dan nilai t hitung sebesar - 2.412652 terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) SMK di Jawa Timur. Sedangkan, secara simultan pertumbuhan	Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti di provinsi Jawa Timur dan sama-sama variabel independennya upah minimum. Perbedaan penelitian ini menggunakan analisis data <i>time series</i> sedangkan penelitian saya menggunakan analisis regresi data panel.

					Ekonomi (PDRB) dan upah minimum berpengaruh tidak signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) SMK di Jawa Timur. Sebesar 59,6 persen variabel bebas dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) SMK di Jawa Timur.	
3	Prihenny Aridesy (Sheila Maria Belgis Putri Affiza, 2022)	Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Upah Minimum Regional Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tasikmalaya Tahun 2009-2019 (2022)	Metode Kuantitatif	Menggunakan Analisis <i>time series</i> dengan alat analisis SPSS	Hasil penelitian ini Jumlah penduduk dan Upah minimum regional (UMR) tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Kota Tasikmalaya serta Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Kota Tasikmalaya	Persamaan pada penelitian ini yaitu wilayahnya pada penelitian ini di kota Tasikmalaya dan sama-sama variabel independennya Jumlah Penduduk, Upah Minimum dan Variabel dependennya pengangguran terbuka. Perbedaan pada penelitian ini terletak di analisisnya yaitu penelitian ini menggunakan analisis <i>time series</i> dan tahunnya yaitu tahun 2009-2019.
4	Dewi Maria Ulfa (Ulfa, 2021)	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Dan Angkatan Kerja Terhadap	Metode Kuantitatif	Menggunakan jenis data panel atau gabungan dari data cross section dan data time series dengan	Hasil uji t, pertumbuhan ekonomi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi	Persamaan pada penelitian ini sama-sama menggunakan analisis data panel dan sama-sama variabel independennya Upah Minimum dan variabel dependennya pengangguran terbuka.

		Tingkat Pengangguran Terbuka Pada Provinsi Banten Dan Provinsi Jawa Timur 2010-2019. (2021)		aplikasi eviews	Banten, namun memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur, upah minimum secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur, angkatan kerja secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten, sedangkan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur.	Perbedaan pada penelitian ini pada tahunnya 2010-2019.
5	Edo Permadi dan Eko Chrystanto (Permadi & Chrystanto, 2021)	Analisa Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Upah	Metode Kuantitatif	Menggunakan analisis regresi linear berganda menggunakan eviews	Hasil penelitiannya menunjukkan baik parsial dan simultan Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Upah Minimum Kabupaten/ Kota	Persamaan pada penelitian ini sama-sama di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dan sama-sama variabel independennya Jumlah Penduduk dan Upah Minimum dan juga sama-sama variabel

		Minimum Kabupaten/Kota terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2018 (2021)			berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur.	dependennya Pengangguran Terbuka. Perbedaan pada penelitian ini yaitu di tahunnya, penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, penelitian ini tahun 2012-2018.
6	Ayu Setyoning Sih (Setyoningsih, 2021)	Analisis Pengaruh Angkatan kerja, Upah Minimum, PDRB Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur (2021)	Metode kuantitatif asosiatif	Menggunakan analisis regresi data panel. Data panel menggunakan aplikasi spss dan juga views dalam pengolahan datanya.	Hasil penelitian menunjukkan variabel angkatan kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur, upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur, PDRB berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur dan indeks pembangunan manusia	Persamaan pada penelitian ini sama-sama menggunakan analisis regresi data panel, sama-sama Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dan sama-sama variabel independen Upah Minimum dan variabel dependennya pengangguran terbuka. Perbedaan pada penelitian ini yaitu variabel independennya tidak ada Jumlah Penduduk.

					berpengaruh signifikan ke arah negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. Secara parsial, variabel angkatan kerja, tingkat upah minimum, PDRB dan indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.	
7	Putri Sari M.J. Silaban, Intan Permata Sari Br Sembiring dan Vini Alvionita Br Sitepu (Silaban et al., 2020)	Analisis Pengaruh PDRB dan Inflasi terhadap Pengangguran Terbuka di Sumatera Utara Periode 2003-2019 (2020)	Metode Kuantitatif	Menggunakan analisis regresi linier berganda dengan software statistika dan ekonometrika Eviews 9	Hasil penelitian menunjukkan secara parsial Produk Domestik Riil Bruto (PDRB) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka di Sumatera Utara pada tahun 2003-2019 dengan nilai prob sebesar 0,00010,05. Secara simultan variabel PDRB dan inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap pengangguran di Sumatera Utara pada tahun 2003-2019.	Persamaan penelitian ini sama sama variabel dependennya pengangguran terbuka. Perbedaan Penelitian ini pada variabel independennya penelitian ini PDRB, dan inflasi, selain itu penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dan juga wilayah penelitiannya di Sumatera Utara dan tahunnya juga penelitian ini tahun 2003-2019.

					Nilai hasil uji R sebesar 77,0674% dan sisanya sebesar 22,0674% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.	
8	Herniwati Retno Handayani (Herniwati & Handayani, 2019)	Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum, Dan PDRB Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Tengah (2019)	Metode Kuantitatif	Menggunakan analisis regresi data panel yang diolah menggunakan Eviews 9.0	Hasil uji simultan (Uji - F) menunjukkan bahwa jumlah penduduk, pendidikan, upah minimum, dan PDRB secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah.	Persamaan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan analisis regresi data panel. Selain itu, sama-sama menggunakan variabel independen Jumlah Penduduk dan Upah Minimum dan variabel dependennya Pengangguran terbuka. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada wilayahnya penelitian ini di Provinsi Jawa Tengah.
9	Yulita Dwi Anggraini (Wati, 2022)	Analisis Pengaruh PDRB, UMK, Angkatan Kerja Dan Pendidikan Terhadap Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Timur (2018)	Metode Kuantitatif	Analisis Regresi Data Panel pada Eviews dan SPSS	Hasil pengujian menunjukkan PDRB, UMK, Angkatan Kerja dan Pendidikan berpengaruh secara bersama-sama terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur Pada tahun 2011 – 2015 dengan tingkat kepercayaan 0,65% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Secara individu hasil penelitian menunjukkan bahwa	Persamaan pada penelitian ini sama-sama menggunakan analisis Regresi Data Panel dan di Provinsi Jawa Timur sama-sama variabel independennya UMK dan variabel dependennya pengangguran terbuka. Perbedaan pada penelitian ini yaitu di tahunnya, pada penelitian ini di tahun 2011-2015.

					UMK dan Angkatan Kerja berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka, sedangkan PDRB dan Pendidikan berpengaruh tidak signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur.	
10	Jefri Setiawan, Moch. Saleh dan Lilis Yuliati (Setiawan et al., 2017)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2015 (2017)	Metode Kuantitatif	Menggunakan metode analisis regresi dengan menggunakan data panel.	Hasil analisis regresi data panel menggunakan model FEM menunjukkan bahwa PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran di provinsi Jawa Timur. Sementara UMK tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di provinsi Jawa Timur. Dengan penelitian ini bisa mengetahui bahwa PDRB, Jumlah Penduduk, dan UMK sangat berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur dengan begitu Pemerintah bisa memberi	Persamaan penelitian ini sama-sama menggunakan analisis regresi data panel dan meneliti di Provinsi Jawa Timur. Perbedaan penelitian ini terletak pada tahunnya penelitian ini di tahun 2009-2015 dan penelitian ini membahas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka.

					inovasi atau membuat lapangan pekerjaan agar pengangguran bisa berkurang.	
--	--	--	--	--	---	--

Dari penelitian terdahulu yang berjumlah 10 judul pada Tabel 2.1 diatas, maka penulis dalam penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam pembaharuan informasi dan juga pengetahuan Ilmu Ekonomi terkait Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Dan Upah Minimum Di Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2011-2020. Dikarenakan pada penelitian ini ada pembaharuan dari penelitian sebelumnya, dan juga perbedaan spesifik pada penelitian ini dengan sebelumnya masih belum ada yang meneliti dengan kesamaan pada variabel Independen Jumlah Penduduk dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap pengangguran terbuka dikarenakan kemungkinan akan memberikan hasil yang berbeda (kondisinya juga yang berbeda-beda) khususnya di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2020 sehingga akan memberikan kontribusi berupa pengetahuan, wawasan dan ilmu baru baik bagi penulis sendiri maupun penelitian selanjutnya dan pastinya bagi para pembaca penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tingkat pengangguran terbuka khususnya di wilayah Provinsi Jawa Timur.

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara ataupun kesimpulan yang didapatkan dari menjawab permasalahan yang diajukan oleh penelitian yang sebetulnya masih dalam tahap diuji secara empiris. Hipotesis ini yakni dugaan baik benar atau salah. Dengan itu berdasarkan landasan teori, maka hipotesis dari penelitian ini adalah :

1. Variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif secara Parsial terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2011-2020.

Menurut Adam Smith dan David Ricardo berpendapat bahwasanya kenaikan pengangguran disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk dikarenakan kedudukan penduduk memiliki fungsi tenaga kerja dengan itu penduduk banyak tanpa adanya penyediaan lapangan kerja yang tidak diimbangi sehingga berakibat pada pengangguran yang banyak pula (Kosanke, 2019).

Sama halnya dengan teori kependudukan dari Malthus, menyatakan bahwa semakin pesatnya jumlah penduduk akan menghasilkan tenaga kerja yang semakin banyak pula, namun hal ini tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang ada. Dan menurut Marxist tekanan penduduk di suatu negara bukanlah tekanan penduduk terhadap bahan makanan, tetapi tekanan terhadap kesempatan kerja (misalnya di negara kapitalis). Karena jumlah kesempatan yang sedikit itulah maka manusia saling bersaing dalam memperoleh pekerjaan dan yang tersisih dalam persaingan tersebut menjadi golongan penganggur (Kosanke, 2019). Dengan itu Teori tersebut menjelaskan pengaruh positif antara jumlah penduduk dengan jumlah pengangguran Terbuka (Kuntiarti, 2018).

2. Variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh negatif secara Parsial terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2011-2020.

Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja semakin baik. Bila peningkatan angkatan kerja seiring dengan bertambahnya partisipasi penduduk yang bekerja (Kuntiarti, 2018). Menurut Sukirno Angkatan kerja dengan memakai salah satu indikator tingkat partisipasi Angkatan kerja sebagai salah satu alat ukur untuk menghitung pengaruh tingkat partisipasi Angkatan kerja terhadap pengangguran terbuka yang dimana semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja semakin baik jika diiringi dengan bertambahnya partisipasi penduduk yang bekerja. Yang artinya semakin tinggi angka tingkat partisipasi Angkatan kerja akan menurunkan angka pengangguran (Faizah & Woyanti, 2023). Dengan itu Teori tersebut menjelaskan pengaruh negatif antar Tingkat Partisipasi Angkatan kerja dengan Pengangguran Terbuka (Kuntiarti, 2018).

3. Variabel Upah Minimum berpengaruh negatif secara Parsial terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2011-2020.

Teori W Phillips yang menyebutkan bahwa ketika upah tinggi pengangguran berada pada tingkat yang rendah. Kurva Phillips merupakan hubungan terbalik antara tingkat pengangguran dan tingkat kenaikan upah nominal (Mankiw, 2019). Semakin tinggi tingkat pengangguran, maka semakin rendah tingkat inflasi upah. Adanya *tradeoff* antara inflasi upah dan pengangguran (Mankiw, 2019). Dengan itu teori ini menyatakan bahwa upah minimum pengaruh negatif terhadap pengangguran Terbuka (Kuntiarti, 2018).

4. Variabel Jumlah Penduduk, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Dan Upah Minimum berpengaruh secara simultan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2011-2020.

Semakin banyak jumlah penduduk maka akan menyebabkan peningkatan jumlah Angkatan Kerja (Kosanke, 2019). Meningkatnya jumlah penduduk dikarenakan kedudukan penduduk memiliki fungsi tenaga kerja dengan itu penduduk banyak tanpa adanya penyediaan lapangan kerja yang tidak diimbangi sehingga berakibat pada pengangguran yang banyak pula (Kosanke, 2019). Menurut Marxist tekanan penduduk di suatu negara bukanlah tekanan penduduk terhadap bahan makanan, tetapi tekanan terhadap kesempatan kerja (misalnya di negara kapitalis).

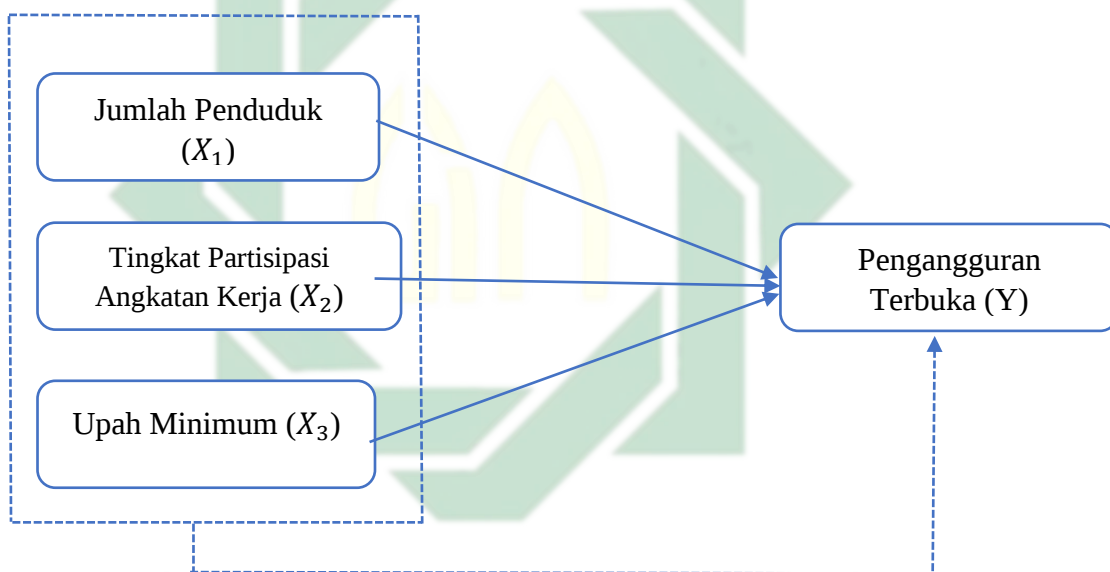
Begitu pula dengan Pertambahan Tingkat Partisipasi Angkatan kerja yang tidak bekerja atau mencari kerja yang tidak diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja sehingga banyak penduduk yang tidak mendapatkan pekerjaan. Namun, Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja semakin baik. Bila peningkatan angkatan kerja seiring dengan bertambahnya partisipasi penduduk yang bekerja (Kuntiarti, 2018).

Ditambah upah minimum tiap tahun meningkat dengan kebijakan pengupahan dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan kehidupan yang layak bagi buruh. Dengan kebijakan pengupahan yang dibuat pemerintah tersebut diharapkan dapat melindungi buruh agar buruh dapat memenuhi kebutuhannya sendiri maupun keluarganya. (Ramadhani, 2020). Dengan itu menunjukkan bahwa Jumlah

penduduk, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Upah Minimum berpengaruh terhadap tingkat pengangguran Terbuka (Kuntiarti, 2018).

2.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan hipotesis yang disebutkan di susunlah skema antar variabel Independen (Bebas) dengan variabel Dependen (Terikat). Lebih jelasnya dapat dilihat dalam kerangka konseptual sebagai berikut :



Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual

Keterangan :

- = Pengaruh Secara Parsial
- - -→ = Pengaruh Secara Simultan

Dari gambar 2.2, menjelaskan pengaruh secara parsial dan simultan dari variabel Jumlah Penduduk (X_1), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (X_2) dan Upah Minimum (X_3) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (Y).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini yang berjudul “Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2011-2020” menggunakan jenis penelitian Kuantitatif Deskriptif. V.Wiratna Sujarweni berpendapat bahwa penelitian kuantitatif ini menghasilkan temuan-temuan yang dapat diperoleh melalui prosedur-prosedur statistik ataupun cara lain yang bersifat kuantitatif atau pengukuran (Pratama, 2019).

Sedangkan yang dikemukakan oleh Sugiyono metode penelitian secara kuantitatif adalah jenis penelitian yang sistematis, terencana serta terstruktur yang secara jelas di awal penelitiannya, selain itu juga metode ini tujuannya adalah menguji hipotesis yang telah ditetapkannya (Sugiyono, 2020). Kemudian, untuk definisi dari Deskriptif yang dikemukakan oleh Sugiyono merupakan metode dengan kegunaan mendeskripsi maupun memperlihatkan gambaran dalam objek penelitian dengan menggunakan data ataupun sampel yang sudah dikumpulkan tanpa melakukan penganalisisan serta pembuatan kesimpulan pada umumnya (Sugiyono, 2020). Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dikarenakan data yang akan diolah merupakan data rasio dan yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel-variabel yang diteliti.

3.2 Tempat atau Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini dilakukan di Indonesia khususnya difokuskan pada Provinsi Jawa Timur. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti melalui perantara dari website resmi yang sudah tervalidasi dan terpercaya seperti BPS (Badan Pusat Statistik) dan website dari berbagai Lembaga yang ada di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan referensi pendukung dalam penelitian ini didapatkan dari jurnal ilmiah maupun publikasi berbasis ilmiah, karya tulis ilmiah yang website resminya sudah terpublikasikan. Tujuannya dikarenakan pada penelitian ini menggunakan data sekunder di Provinsi Jawa Timur.

3.3 Populasi Dan Sampel

Populasi merupakan jumlah keseluruhan data yang dijadikan acuan untuk pengambilan data yang nantinya akan dijadikan penelitian (Sugiyono, 2020). Populasi pada penelitian ini seluruh 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, dengan rentang waktu 2011-2020 = 10 tahun. Sedangkan pada sampel penelitian ini menggunakan sampel jenuh atau sensus yang dimana semua anggota populasi dijadikan sampel (Sugiyono, 2020). Jadi, sampel pada penelitian ini merupakan data *time series* yang digunakan tahun 2011-2020 atau 10 tahun juga digabungkan dengan data *cross section* yaitu 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Jadi $38 \times 10 = 380$ sampel observasi.

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

3.4.1 Definisi Operasional

1. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan seseorang yang bertempat tinggal di daerah tertentu yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut dengan bukti surat kewarganegaraan. Sedangkan jumlah penduduk merupakan jumlah manusia yang bertempat tinggal ataupun yang berdomisili di suatu wilayah tersebut dengan bukti tercatat secara sah berdasarkan peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Pada penelitian ini menggunakan Data Jumlah Penduduk yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2020.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. Pada penelitian ini menggunakan Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2020.

3. Upah Minimum

Upah merupakan hasil imbalan yang didapatkan oleh para pekerja atau buruh yang sudah melakukan pekerjaannya. Sedangkan upah minimum merupakan ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintahan setempat dengan mengatur nominal minimum sesuai dengan provinsinya dengan upaya mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerjaan atau buruh. Dalam penelitian ini menggunakan data Upah Minimum yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2020.

4. Pengangguran Terbuka

Pengangguran Terbuka merupakan seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan, masih mencari kerja, berusaha mempersiapkan usahanya serta yang tidak mencari kerja dikarenakan mereka memiliki pemikiran tidak akan pernah mendapatkan pekerjaan serta yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

3.4.2 Pengukuran Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel dependen (terikat) dengan simbol Y dan variabel Independen (Bebas) dengan Simbol X dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Variabel dependen

Variabel ini merupakan variabel yang besarnya dipengaruhi oleh variabel lain. Pada penelitian ini menggunakan variabel dependen pada Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dalam bentuk persen.

2. Variabel independen

Variabel ini mempengaruhi atau yang menjadi sebab terjadinya perubahan atau timbulnya pada variabel dependen. Untuk variabel Independen disini ada tiga yaitu :

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk yang digunakan dalam penelitian ini pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2020. Variabel ini dalam bentuk jiwa.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK pada kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2020. Variabel ini dalam bentuk persen.

3. Upah Minimum

Upah minimum ini pada kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2020. Variabel ini dalam bentuk rupiah per-tahun.

3.5 Jenis dan Sumber Data

3.5.1 Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder. Data sekunder ini menjelaskan mengenai pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Upah Minimum terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur dengan metode studi kepustakaan. Menurut Nazir studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir, 2020).

Data sekunder yaitu data dengan pengumpulan dari sumber yang tidak langsung dengan objek penelitian yang diteliti ataupun sumber-sumber lain yang terkait dalam penelitian tersebut, yang di mana dalam data tersebut didapatkan

dari instansi maupun Lembaga yang resmi dan tervalidasi kebenarannya seperti Badan Pusat Statistik. Penelitian ini menggunakan data panel yaitu gabungan data runtut waktu (*time series*) serta data antar unit (*cross section*). Data *time series* yang dipergunakan yaitu tahun 2011-2020 dan data *cross section* yaitu 38 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur sehingga diperoleh data sejumlah 380 observasi.

3.5.2 Sumber Data

Sumber Data-data yang peneliti pergunakan diperoleh dari beberapa sumber, seperti :

1. Jumlah Penduduk yang ada di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2020 bersumber di website resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011-2020 yang bersumber dari website resmi badan pusat statistik survei angkatan kerja nasional dan dari buku laporan eksekutif keadaan angkatan kerja Provinsi Jawa Timur.
3. Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2011-2020 yang bersumber dari surat keputusan gubernur Provinsi Jawa Timur terkait dengan upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2020.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka yang ada di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2020 bersumber di website resmi badan pusat statistik Provinsi Jawa Timur.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Riduwan metode pengumpulan merupakan teknik ataupun cara-cara yang dipergunakan dalam penelitian oleh peneliti yang tujuannya untuk mengumpulkan data (Rosliani, 2017). Menurut Sugiyono Teknik pengumpulan merupakan Langkah utama dalam penelitian karena tujuan awalnya mendata data, Teknik pengumpulan data tersebut meliputi Angket (*Questionnaire*) , wawancara dan dokumentasi (Sugiyono, 2020).

Namun, pada penelitian ini dikarenakan menggunakan data sekunder dengan itu menggunakan metode dokumentasi atau studi pustaka. Dokumentasi ini berupa dokumen-dokumen yang terkait dalam penelitian ini yang dimana dokumen tersebut terdapat di website, Lembaga-lembaga resmi yang tervalidasi dan terpercaya kebenarannya yang telah dipublikasikan secara resmi di situs Badan Pustaka Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur. Kemudian untuk referensi pendukungnya dari situs resmi seperti jurnal ilmiah, karya tulis ilmiah yang sudah terindeks seperti SINTA.

3.7 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan Teknik analisis regresi data panel. Data panel sendiri merupakan gabungan antara data *time series* dengan *cross section*. Dengan menggunakan alat bantu program Eviews 10. Data panel sendiri memiliki kelebihan menurut Baltagi sebagai berikut :

1. Gabungan observasi *time series* dan *cross section* membuat data ini lebih informatif, lebih banyak variasi serta linieritas lebih kecil antara variabel lainnya dan lebih efisien.
2. Data panel lebih cocok untuk dipelajari dinamika perubahan dengan melihat hasil observasi dari *cross section*.
3. Dampaknya dari data *cross section* murni maupun *time series* murni bisa dideteksi dengan data panel.
4. Data panel juga memudahkan untuk dipelajari pada model perilaku yang rumit serta dapat membuat data menjadi berjumlah ribuan unit.

Kemudian, dalam menganalisis model data panel Gujarati dan Porter mengemukakan terdapat beberapa pendekatan yaitu (Gujarati dan Porter 2019):

1. *Common Effect Model (CEM) atau Pooled Least Square Model (PLS)*

Pemodelan ini yaitu model yang paling sederhana dibanding pendekatan lain, disebabkan hanya kombinasi data *time series* serta *cross section* dengan pendekatan *ordinary least square (OLS)*.

2. *Fixed Effect Model (FEM)*

Pemodelan ini memperkenalkan perbedaan antara subjek dan memberi setiap entitas dengan nilai intercept masing-masing, namun juga mempertahankan asumsi slope koefisien tetap. Model ini memiliki intercept yang berubah-ubah untuk tiap unit *cross section*, namun sifatnya tetap secara *time series*.

3. *Random Effect Model (REM)*

Pemodelan ini mengasumsikan bahwa tiap individu merupakan sebuah pengambilan acak dari populasi yang lebih besar dengan nilai rata-rata konstan. Model ini memperhitungkan bahwa error mungkin berkorelasi sepanjang *time series* dan *cross section*.

3.7.1 Pemilihan Pendekatan Regresi Data Panel

Pemilihan pada model regresi panel tujuannya agar dapat menentukan model analisis pada data panel yang dipergunakan.

1. Uji Chow

Uji ini merupakan uji statistic yang digunakan untuk menentukan penggunaan model yang baik diantaranya FEM (*Fixed Effect Model*) atau juga PLS (*Pooled Least Square*). Dalam pengujian ini data yang diregresikan dengan menggunakan model PLS dan FEM kemudian dibuatlah hipotesisnya :

H_0 = Maka dipergunakan model *Pooled Least Square* (PLS) atau CEM

H_1 = Maka dipergunakan model *Fixed Effect*

Dengan kriteria yang dipergunakan dalam uji Chow :

- a. Jika nilai probabilitas chi-square $> 0,05$ artinya H_0 diterima; maka model yang digunakan adalah *Pooled Least Square* (PLS)
- b. Jika nilai probabilitas chi-square $< 0,05$ artinya H_0 ditolak; maka model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model* dan dilanjutkan dengan uji Hausman untuk memilih apakah menggunakan model *Fixed Effect Model* atau *Model Random Effect*.

2. Uji Hausman

Uji ini dipergunakan dalam penentuan penggunaan model yang baik antar FEM atau REM. Untuk pengujian Hausman ini test data yang diregresikan dengan REM kemudian, dibandingkan antara model FEM dan REM. Dengan hipotesis :

H_0 = maka dipergunakan model REM

H_1 = maka dipergunakan model FEM

Kriteria yang dipergunakan dalam kesimpulan uji ini yaitu :

- a. Jika nilai probabilita Chi-Square > 0,05, maka H_0 diterima, yang artinya model Random Effect Model (REM).
- b. Jika nilai probabilita Chi-Square < 0,05, maka H_1 ditolak, yang artinya model Fixed Effect Model (FEM).

3.7.2 Estimasi Regresi Data Panel

Pada penelitian ini dapat dituliskan persamaan secara parsial dan simultan sistematisnya sebagai berikut :

$$PT = -\beta_0 + \beta_1 JP - \beta_2 TPAK - \beta_3 UMK + \varepsilon$$

$$PT_{it} = -\beta_0 + \beta_1 JP_{it} - \beta_2 TPAK_{it} - \beta_3 UMK_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

PT_{it} = Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Persen)

JP = Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota (Jiwa)

TPAK = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen)

UMK = Upah Minimum Kabupaten/Kota (Rupiah)

β_0 = Konstanta Regresi

$\beta_1\beta_2\beta_3$ = Slope atau Koefisien regresi

i = Cross Section (38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur)

t = Time Series (Tahun 2011-2020)

ε = Error Term

Kemudian juga, pada model penggunaan Logaritma (Log) dengan tujuan memudahkan estimasi. Menurut Gujarati dan Porter menyatakan model Logaritma (Log) dipergunakan untuk pengukuran elastisitas variabel dependen terhadap variabel Independen. Persamaan data panel tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut (Gujarati dan Porter, 2019) :

$$\text{LogPT}_{it} = -\beta_0 + \beta_1 \text{LogJP}_{it} - \beta_2 \text{LogTPAK}_{it} - \beta_3 \text{LogUMK}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

LogPT_{it} = Pengangguran Terbuka Kabupaten/ Kota di Jawa Timur
(Persen)

LogJP = Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota (Jiwa)

LogTPAK = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen)

LogUMK = Upah Minimum Kabupaten/Kota (Rupiah)

β_0 = Konstanta Regresi

$\beta_1\beta_2\beta_3$ = Slope atau Koefisien regresi

i = Cross Section (38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur)

t = Time Series (Tahun 2011-2020)

ε = Error Term

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini tujuannya agar mengetahui permasalahan dalam menganalisis data. Pengujian asumsi klasik meliputi :

1. **Uji Heteroskedastisitas**, Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari nilai residual. Ghozali dan Ratmono mengatakan masalah heteroskedastisitas umumnya terjadi pada data silang (*cross section*) daripada data runtun waktu (*time series*). Heteroskedastisitas tidak menyebabkan estimator (koefisien variabel independen) menjadi bias karena residual bukan komponen perhitungannya. Namun menyebabkan estimator tidak efisien dan BLUE lagi serta standard error dari model regresi menjadi bias sehingga menyebabkan nilai t statistik dan F hitung bias (*misleading*). Dampak akhirnya adalah pengambilan kesimpulan statistik menjadi tidak valid (Ghozali dan Ratmono, 2019).
2. **Uji Multikolinearitas**, uji ini dilakukan apabila model regresi yang dipergunakan terhadap korelasi dengan variabel independen. Uji ini hanya terjadi pada regresi ganda. Jika tidak terjadi korelasi tinggi antara variabel independen maka model regresi yang digunakan baik, namun, jika terjadi hubungan linier sempurna diantara beberapa atau semua variabel independen maka dikatakan terdapat masalah multikolinearitas dalam model tersebut.
3. **Uji Normalitas**, Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal.

Seperti yang diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Bila asumsi tidak terpenuhi maka uji statistik menjadi tidak valid khususnya untuk ukuran sampel kecil. Sedangkan pada ukuran sampel besar kita dapat mengabaikannya (Ghozali dan Ratmono, 2020). Terdapat dua cara mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji Jarque-Bera. Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Jarque-Berra. Uji JB adalah uji normalitas untuk sampel besar. Uji JB terlebih dahulu dilakukan dengan cara menghitung nilai Skewness dan Kurtosis untuk residual.

3.7.4 Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan Uji Koefisien Determinasi R^2 , Uji Signifikansi Simultan (Uji F) Dan Uji Statistik t (Uji t) dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Koefisien Determinasi R^2

Pada Uji Statistik Determinasi R^2 ini untuk pengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi pada variabel dependen (Iii, 2020). Nilai koefisien determinasi yaitu nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil artinya kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas. Nilai yang mendekati satu artinya variabel independen memberikan hampir semua informasinya yang dibutuhkan guna memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data *cross section* relatif lebih rendah karena adanya variasi yang lebih

besar antara masing-masing pengamatan. Sedangkan untuk *time series* biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali dan Ratmono, 2020).

Kelemahan dari penggunaan koefisien determinasi R^2 merupakan bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan di dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka nilai R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti yang menganjurkan untuk menggunakan adjusted R^2 pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik.

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji Signifikansi Simultan atau Uji F dipergunakan untuk menunjukkan apakah keseluruhan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama, digunakan uji F dengan hipotesis sebagai berikut :

$H_0 = \beta_1, \beta_2, \beta_3 = 0$, artinya variabel Independen secara Bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

$H_1 = \beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$, artinya variabel independen secara Bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Kriteria yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan uji F dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya terdapat pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya tidak ada pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

3. Uji Statistik t

Uji t bertujuan agar dapat mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual (parsial) terhadap variasi dari variabel dependen. Untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap dependennya, maka dibuat hipotesis sebagai berikut :

1. $H_0 > 0,05$ artinya tidak ada pengaruh variabel Jumlah Penduduk secara individual terhadap tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur.
 $H_1 < 0,05$ artinya terdapat pengaruh variabel Jumlah Penduduk secara individual terhadap tingkat pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur.
2. $H_0 > 0,05$ artinya tidak ada pengaruh variabel Tingkat partisipasi Angkatan Kerja secara individual terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur.

$H_1 < 0,05$ artinya terdapat pengaruh variabel tingkat partisipasi Angkatan Kerja secara individual terhadap tingkat pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur.

3. $H_0 > 0,05$ artinya tidak ada pengaruh variabel Upah Minimum secara individual terhadap tingkat pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur.

$H_1 < 0,05$ artinya terdapat pengaruh variabel Upah Minimum secara individual terhadap tingkat pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur.

Kriteria yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan uji t dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai t hitung $> t$ tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya ada pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen
2. Jika nilai t hitung $< t$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya tidak ada pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum di Provinsi Jawa timur

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki 34 Provinsi. Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi Jawa Timur secara geografis terletak 111°-114,04' Bujur Timur dan 70,12'-80,48''Lintang Selatan, dengan luas Wilayah 47.963 Km² yang meliputi bagian utama Jawa Timur daratan dan Kepulauan Madura (Jatimprov, 2020). Wilayah daratan Jawa Timur sebesar 88,70 persen atau 42.541 Km², sementara luas Kepulauan Madura memiliki luas 11,30 persen atau sebesar 5.422 Km² (Jatimprov, 2020). Provinsi Jawa Timur sendiri menempati wilayah di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa terdapat 6 provinsi yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta. Dari 6 provinsi di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur Secara administratif Jumlah Kabupaten dan Kota 38 yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota (Jatimprov, 2020).

Tabel 4. 1 Jumlah Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi di Pulau Jawa

Pulau Jawa					
No	Kode Wilayah	Nama Provinsi	Jumlah Kabupaten	Jumlah Kota	Jumlah Kabupaten dan Kota
1	36	Banten	4	4	8
2	31	DKI Jakarta	1	5	6
3	35	Jawa Timur	29	9	38
4	32	Jawa Barat	18	9	27
5	33	Jawa Tengah	29	6	35
6	34	DI Yogyakarta	4	1	5

Sumber : Kementerian Komunikasi Dan Informasi Provinsi Jawa Timur, 2021

Dari Tabel 4.1 di atas memaparkan rincian jumlah kabupaten dan kota tiap Provinsi di Pulau Jawa yang menduduki tingkat tertinggi yaitu Jawa Timur dengan Jumlah 38 yang terdiri 29 Kabupaten dan 9 Kota dan yang menduduki tingkat terakhir yaitu Provinsi Di Yogyakarta dengan jumlah 5 yang terdiri dengan 4 kabupaten dan 1 kota.

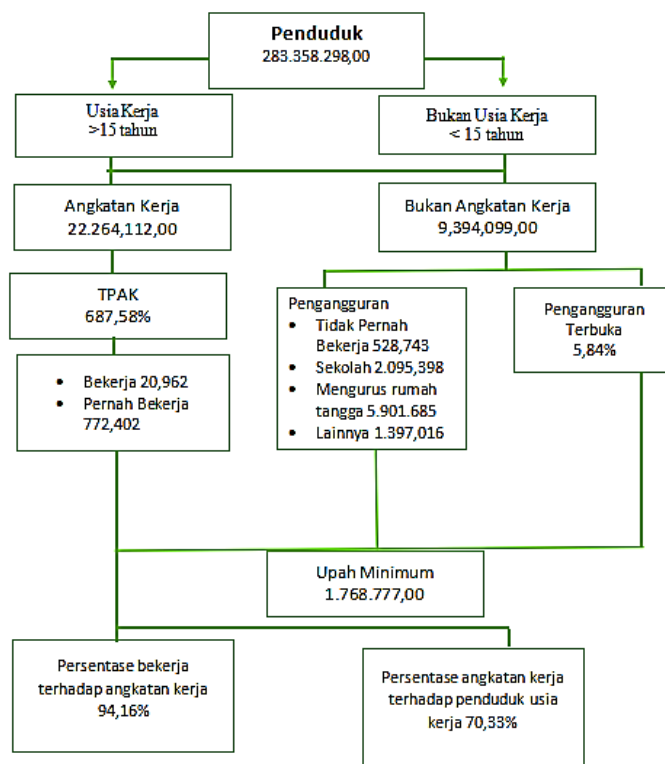
Dikarenakan di Pulau Jawa jumlah kabupaten/kota yang paling tinggi adalah Provinsi Jawa Timur, dengan itu luas wilayahnya juga di antara Pulau Jawa yang paling luas atau terbesar sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Luas Wilayah Per-Provinsi di Pulau Jawa

No	Provinsi	Luas Wilayah Km ²
1	Banten	9.662,92
2	DKI Jakarta	664,01
3	Jawa Timur	47.803,49
4	Jawa Barat	35.377,76
5	Jawa Tengah	32.800,69
6	DI Yogyakarta	3.133,15

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Pada tabel 4.2 terlihat bahwa luas wilayah pada Provinsi di Pulau Jawa yang menduduki luas wilayah terbesar ada di Provinsi Jawa Timur yang sebesar 47.803,49 Km² dan yang paling rendah ada pada DKI Jakarta yang sebesar 664,01 Km². dari luas wilayah yang menduduki tingkat pertama yaitu Jawa Timur, kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur dapat dilihat dari Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan kerjanya. Dari bekerja dan penganggurannya. Rata-rata usia kerja lebih besar dari 15 tahun dan bukan usia kerja lebih kecil dari 15 tahun. Berikut kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :



Sumber : Badan Pustaka Statistik, 2021

Gambar 4. 1 Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur

Dari gambar 4.1 di atas menunjukkan bahwa persentase bekerja terhadap angkatan kerja lebih besar sebesar 94,16% dibandingkan dengan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja yang sebesar 70,33% (BPS, 2022). dan dari sumber BPS sektor formal di Jawa timur sampai tahun 2020 sebesar 36,36% (BPS, 2022).

4.1.2 Gambaran Umum Tingkat Pengangguran Terbuka (Y) di Jawa Timur

Menurut Badan Pusat Statistik mendefinisikan pengangguran terbuka yaitu seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan, masih mencari kerja, berusaha mempersiapkan usahanya serta yang tidak mencari kerja dikarenakan mereka memiliki pemikiran tidak akan pernah memperoleh pekerjaan serta yang sudah punya pekerjaan namun belum memulai bekerja (BPS, 2022). Dan data tingkat pengangguran terbuka di

Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2011-2020 dijabarkan di lampiran 6.1. Pada data tersebut menunjukkan bahwa keseluruhan kabupaten dan kota ada 38 data tingkat pengangguran terbuka di provinsi Jawa Timur dan juga dari keseluruhan jumlah tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011 sampai 2020 mengalami fluktuasi dan tingkat TPT di Jawa Timur yang paling tinggi di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

4.1.3 Gambaran Umum Jumlah Penduduk (X_1) di Jawa Timur

Menurut Badan Pusat Statistik Jumlah Penduduk merupakan keseluruhan orang yang domisilinya di wilayah geografis Republik Indonesia atau juga yang berdomisili kurang lebih 6 bulan dengan tujuannya menetap di wilayah tersebut (BPS,2022). Dan data Jumlah Penduduk di Provinsi Jawa Timur dipaparkan pada lampiran 6.3 yang berjumlah 38 kabupaten dan kota Jumlah penduduk di Jawa Timur dengan total keseluruhan jumlah penduduknya. Dari keseluruhan Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai 2020. Di tahun 2020 sebesar 406.656,96 juta jiwa yang ada di Jawa Timur.

Dari 40,67 juta penduduk Jawa Timur sejumlah 93,13 persen atau sekitar 37,87 juta penduduk berdomisili sesuai KK/KTP. Sementara 6,87 persen atau sekitar 2,80 juta penduduk lainnya berdomisili tidak sesuai KK/KTP. Jumlah ini mengindikasikan banyaknya penduduk yang bermigrasi dari wilayah tempat tinggal sebelumnya karena sekarang sudah tidak tinggal pada alamat yang tercatat pada KK (BPS Jawa Timur, 2021).

Hasil SP2020 mencatat mayoritas penduduk Jawa Timur didominasi oleh Generasi Z dan Generasi Milenial. Pola komposisi penduduk menurut generasi Jawa Timur ini sama dengan nasional. Proporsi Generasi Z sebanyak 24,80 persen dari total populasi dan

Generasi Milenial sebanyak 24,32 persen dari total populasi Jawa Timur. Kedua generasi ini termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi (BPS Jawa Timur, 2021).

4.1.4 Gambaran Umum Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (X_2) di Jawa Timur

Menurut Badan Pusat Statistik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas (BPS, 2022). Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di paparkan di lampiran 6.2 yang berjumlah 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Dari data tersebut pertambahan jumlah partisipasi Angkatan kerja juga meningkat. Dan yang paling tinggi ada di tahun 2020 dengan jumlah keseluruhan di tingkat partisipasi Angkatan kerja di Jawa Timur yaitu sebesar 70.33% dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

4.1.5 Gambaran Umum Upah Minimum (X_3) di Jawa Timur

Upah minimum merupakan standar minimum untuk para pekerja supaya mereka tidak mendapat upah yang lebih rendah dan mendapat kesetaraan yang sudah dilakukannya (Herman, 2019). Tiap tahunnya pemerintah di Indonesia selalu meningkatkan upah minimum di tiap-tiap daerah khususnya di Jawa Timur. Data Upah Minimum di Provinsi Jawa Timur dipaparkan pada lampiran 6.4 dengan jumlah 38 kabupaten dan kota Upah Minimum di Jawa Timur. Dari data tersebut menunjukkan bahwa Upah Minimum di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan yang signifikan. Dan di tahun 2020 yang paling besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dilihat dari total keseluruhan Upah Minimum di Jawa Timur dari tahun 2011 yang sebesar Rp.705.000,00 sampai ditahun 2020 sebesar Rp. 1.768.777,00.

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Data yang digunakan pada variabel dependen yaitu tingkat pengangguran terbuka 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2011 – 2020. Variabel independen yang digunakan yaitu jumlah penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja, upah minimum 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2011 – 2020. Hasil statistik deskriptif pada tabel 4.3 akan ditampilkan perhitungan dari mean, standar deviasi, minimal, serta maksimal. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan satuan persen.

Tabel 4. 3 Statistik Deskriptif

Variabel	N	Mean	Standar Deviasi	Maximum	Minimum
TPT	38	4.370132	1.774309	10.97000	0.850000
Jumlah Penduduk	38	1026086	645236.4	2896195	121517.0
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	38	69.35903	3.774468	81.95000	60.56000
UMK	38	1613878	731340.4	4200479	705000.0

Sumber : Hasil melalui Eviews 10

Berdasarkan tabel di atas, masing-masing variabel terdiri dari 38 data, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut variabel tingkat pengangguran terbuka (TPT) memiliki rata – rata sebesar 4,37 dengan standar deviasi sebesar 1,77. Nilai rata – rata tingkat pengangguran terbuka lebih besar dari nilai standar deviasi. Hal ini menunjukkan bahwa penyimpangan data yang terjadi relatif lebih rendah serta distribusi nilainya merata. Besaran tingkat pengangguran terbuka terendah pada tahun 2017 di Kabupaten Pacitan sebesar 0,85. Namun, sebaliknya tingkat

pengangguran terbuka tertinggi pada tahun 2020 di Kabupaten Sidoarjo sebesar 10,97.

Variabel jumlah penduduk memiliki rata-rata 1.026.086 dengan standar deviasi 645.236. Nilai rata-rata jumlah penduduk lebih besar dari nilai standar deviasi. Hal ini menunjukkan bahwa penyimpangan data yang terjadi relatif lebih rendah serta sebaran nilainya merata. Jumlah penduduk terendah pada tahun 2011 terdapat di Kota Mojokerto sebesar 121.517. Namun sebaliknya jumlah penduduk tertinggi pada tahun 2020 berada di kota Surabaya yaitu sebanyak 2.874.314.

Rata-rata variabel tingkat partisipasi angkatan kerja ialah 69,36 dengan standar deviasi 3,77. Nilai rata-rata tenaga kerja melebihi nilai standar deviasi. Hal ini menunjukkan bahwa penyimpangan data berkurang secara signifikan serta distribusi nilainya merata. Kota Malang memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja terkecil pada tahun 2015, yaitu sebanyak 60,56 orang. Sedangkan Kabupaten Pacitan memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja terbesar pada tahun 2011, yaitu sebanyak 81,95 orang.

Variabel upah minimum distrik rata-rata ialah 1.613.878 dengan standar deviasi 731.340. Deviasi standar lebih besar dari nilai rata-rata upah minimum kabupaten. Ini menunjukkan bahwa data pada data yang terjadi jauh lebih rendah, serta distribusi nilai tersebar secara merata. Pada 2011, upah minimum terendah di Kabupaten Pacitan ialah 705.000. Di sisi lain, gaji minimum distrik tertinggi di Surabaya pada tahun 2020 ialah 4.200.479.

4.2.2 Hasil Uji Model Regresi Data Panel

Pengujian pendekatan estimasi regresi adalah salah satu cara untuk menentukan model mana yang terbaik untuk penelitian ini. Ada tiga model yang dapat dipergunakan untuk menentukan model regresi: *Fixed Effects Model* (FEM), *Random Effects Model* (REM), *Common Effects Model* (CEM). Uji Chow serta Hausman dapat dipergunakan untuk menentukan model yang tepat untuk dipergunakan.

1. Uji Chow

Chow test dipergunakan untuk memilih model terbaik dari *Common Effect Model* serta *Fixed Effect Model*. Chow test harus memenuhi kriteria sebagai berikut: jika *p-value* lebih besar dari 0,05, maka *common effect model* yaitu model yang tepat untuk diterapkan. Jika *p-value* kurang dari 0,05, *fixed effect model* yaitu pilihan terbaik. Hasil estimasi uji Chow ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 4 Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	11.469752	(37,339)	0.0000
Cross-section Chi-square	308.467634	37	0.0000

Sumber : Hasil melalui Eviews 10

Tabel 4.4 menampilkan *p-value* sebesar 0,000 yang menunjukkan bahwa *p-value* lebih kecil dari taraf (0,05). Ketika H_0 ditolak, disimpulkan bahwa *model Fixed Effects* atau juga disebut model efek tetap (FEM) ialah model terbaik untuk penelitian ini.

2. Uji Hausman

Uji hausman dipergunakan untuk memilih model terbaik dari *Model Random Effects* serta *Model Fixed Effects*. Jika *p-value* lebih besar dari 0,05, *random effects model* ialah model yang tepat untuk diterapkan, menurut persyaratan uji Hausman. Jika *p-value* kurang dari 0,05, *model Fixed Effects* (FEM) ialah model yang tepat untuk diterapkan dalam penelitian ini. Hasil estimasi Hausman Test ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 5 Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	56.363336	3	0.0000

Sumber : Hasil melalui Eviews 10

Tabel 4.5 temuan mengungkapkan nilai *chi-squared* ialah 56,363. Nilai *p-value* ialah 0,000, menunjukkan bahwa nilai *p* lebih kecil dari level (0,05).

Setelah menolak H_0 , dimungkinkan untuk menyimpulkan bahwa model efek tetap (FEM) ialah model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini.

4.3 Analisis Model

4.3.1 Hasil Estimasi Regresi

Setelah uji Chow serta Hausman, ditentukan bahwa *Fixed Effects Model* (FEM) ialah model estimasi terbaik untuk dipergunakan dalam penelitian ini. Data dari *fixed effect model* ditunjukkan di bawah ini.

Tabel 4. 6 Hasil Estimasi Regresi Fixed Effects Model (FEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOGJP	3.316688	0.913323	3.631451	0.0003
LOGTPAK	-0.323632	0.419981	-0.770587	0.4415
LOGUMK	-0.252573	0.066963	-3.771858	0.0002
C	-38.73718	11.82851	-3.274900	0.0012
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.680649	Mean dependent var	1.386840	
Adjusted R-squared	0.642967	S.D. dependent var	0.439752	
S.E. of regression	0.262762	Akaike info criterion	0.266480	
Sum squared resid	23.40583	Schwarz criterion	0.691604	
Log likelihood	-9.631248	Hannan-Quinn criter.	0.435171	
F-statistic	18.06319	Durbin-Watson stat	1.747087	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Hasil melalui Eviews 10

Berdasarkan hasil regresi sebelumnya, persamaan model regresi data panel adalah sebagai berikut:

$$\text{LOGTPT}_{it} = -38,737 + 3,317 \text{ LOGJP}_{it} - 0,324 \text{ LOGTPAK}_{it} - 0,252 \text{ LOGUMK}_{it} + \varepsilon_{it}$$

4.3.2 Hasil Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik

Sangat penting untuk mengevaluasi asumsi klasik karena estimasi regresi OLS ialah bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Jika dibandingkan dengan parameter yang diturunkan dari pendekatan linier lainnya, hasil estimasi terbaik memiliki variansi terkecil. Lalu ada *Unbiased*, yaitu kondisi estimasi yang dilakukan pada sampel berulang dengan nilai rata-rata estimasi yang mendekati nilai populasi.

Model linier dipergunakan dalam analisis regresi sesuai dengan kriteria model OLS. Ketika temuan estimasi dihasilkan secara tepat serta efisien, kata "estimator" digunakan. Menurut Nachrowi dan Mahyus Eka uji autokorelasi hanya

memiliki satu nilai dalam model regresi. Jika berbagai temuan uji autokorelasi, seperti Durbin Watson, ditemukan dalam satu model, maka uji tersebut tidak valid lagi. Selanjutnya, jika urutan data diubah (dalam contoh ini mengarah pada data cross section), hasil uji autokorelasi akan bervariasi sehingga menyebabkan temuan uji autokorelasi menjadi tidak akurat. Sebaliknya, uji multikolinearitas, uji normalitas dan heteroskedastisitas harus dilakukan dalam model pendekatan Ordinary Least Square (OLS) (Mahyus Ekananda, 2016).

Kriteria ini dimaksudkan untuk mengeliminasi kesalahan dalam estimasi serta interpretasi model, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai alat pengambilan keputusan. Berikut ialah beberapa asumsi standar yang harus dipenuhi:

1. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menentukan apakah terdapat ketidaksamaan varian antara residual pengamatan dalam model regresi. Jika varians dari satu pengamatan residual ke pengamatan lainnya tetap konstan, ini disebut sebagai homoskedastisitas; jika bervariasi, ini disebut sebagai heteroskedastisitas. Homoskedastisitas ialah model regresi yang sangat baik. Untuk menguji heteroskedastisitas seperti yang ditentukan oleh persyaratan uji Glejser.

Tabel 4. 7 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	2.403242	Prob. F(3,376)	0.0672
Obs*R-squared	7.149338	Prob. Chi-Square(3)	0.0673
Scaled explained SS	7.763826	Prob. Chi-Square(3)	0.0512

Test Equation:
Dependent Variable: ARESID

Method: Least Squares
Date: 01/17/23 Time: 15:23
Sample: 1 380
Included observations: 380

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.215742	1.093739	0.197251	0.8437
LOGJP	-0.028640	0.015565	-1.840009	0.0666
LOGTPAK	0.223548	0.225765	0.990180	0.3227
LOGUMK	-0.034145	0.029964	-1.139539	0.2552
R-squared	0.018814	Mean dependent var		0.288766
Adjusted R-squared	0.010985	S.D. dependent var		0.235503
S.E. of regression	0.234206	Akaike info criterion		-0.054761
Sum squared resid	20.62452	Schwarz criterion		-0.013285
Log likelihood	14.40455	Hannan-Quinn criter.		-0.038303
F-statistic	2.403242	Durbin-Watson stat		1.464120
Prob(F-statistic)	0.067239			

Sumber : Hasil melalui Eviews 10

Berdasarkan tabel 4.7, diperoleh hasil nilai probabilitas uji Glejser sebesar 0,0673 dengan signifikansi di level 5 persen, sehingga dapat disimpulkan model tidak terjangkit gejala heteroskedastisitas.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen berkorelasi atau tidak. Karena nilai standard error signifikan, multikolinearitas berkembang. Akibatnya, t-hitung akan lebih kecil dari t-tabel saat koefisien diuji, tidak ada hubungan linier antara variabel independen serta dependen. Nilai toleransi ataupun VIF (*Variance Inflation Factor*) dipergunakan untuk mengetahui adanya multikolinearitas. Ketika skor VIF lebih dari 10, data dikatakan memiliki masalah multikolinearitas. Bila angka VIF kurang dari 10, data bebas dari masalah multikolinearitas (Ghozali, 2016).

Tabel 4. 8 Uji Multikolinearitas

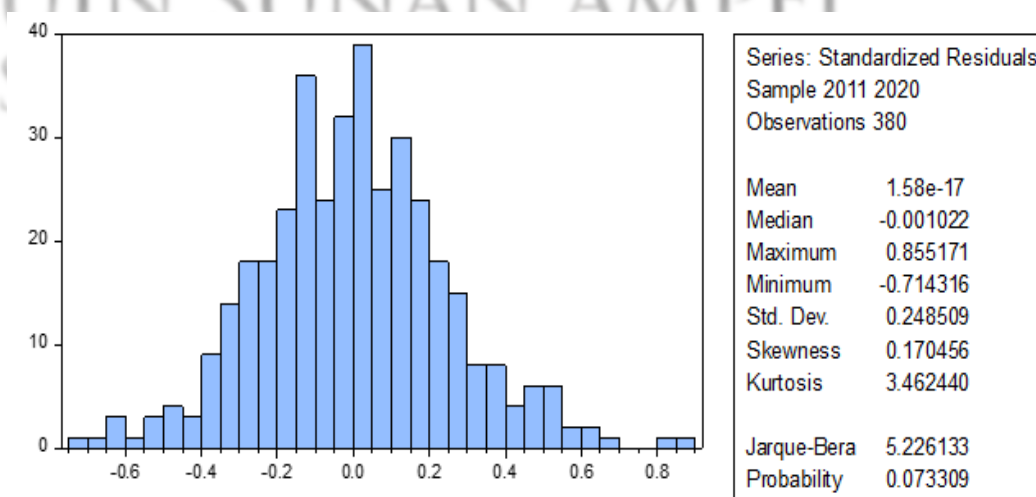
Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
LOGJP	0.000619	311.1556	1.047258
LOGTPAK	0.130255	6342.520	1.014204
LOGUMK	0.002294	1256.177	1.061679
C	3.057096	8287.338	NA

Sumber : Hasil melalui Eviews 10

Nilai VIF dari variabel independen bervariasi, serta tidak ada yang melampaui aturan praktis (10). Model yang diestimasi dalam penelitian ini dapat disimpulkan tidak menunjukkan gejala multikolinearitas.

3. Uji Normalitas

Uji Normalitas menentukan apakah distribusi data mendekati distribusi normal. Jika data berdistribusi normal, itu akan berbentuk lonceng. Tes *Jarque-Berra* digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan normalitas. Tabel 4.13 menampilkan hasil pengujian.

Tabel 4. 9 Uji Normalitas

Sumber : Hasil melalui Eviews 10

Berdasarkan tabel 4.9 nilai *Jarque-Berra* sebesar 5.226 dengan probabilitas *p-value* sebesar 0,0733 serta signifikan pada level 5 persen (0,05). H_0 menunjukkan bahwa model regresi (*residual*) dengan distribusi normal dapat diterima.

4.3.3 Hasil Uji Statistik Analisis Regresi

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa baik variabel independen dapat diwakili oleh variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara 0 serta 1 menunjukkan bagus tidaknya koefisien determinasi. Jika koefisien determinasi mendekati satu, ini menyiratkan bahwa faktor-faktor independen meningkat serta menjadi lebih akurat, menyiratkan bahwa tingkat respons terbuka dapat sepenuhnya dijelaskan oleh jumlah penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja, serta variabel upah minimum. Sebaliknya, jika koefisien determinasi (R^2) mendekati nol (0), jumlah penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja, serta upah minimum untuk menjelaskan variabel tingkat pengangguran terbuka. Koefisien determinasi dihitung sebagai berikut (R^2).

Tabel 4. 10 Uji Koefisien Determinasi

<i>R-squared</i>	<i>Adjusted R-squared</i>
0,6806	0,6429

Sumber : Hasil melalui Eviews 10

Berdasarkan tabel 4.10, nilai *R-squared* ialah 0,6806 yang berarti bahwa ketiga variabel independen yaitu jumlah penduduk, tingkat partisipasi angkatan

kerja, serta upah minimum dapat menjelaskan 68,06 persen varian pada variabel dependen yaitu tingkat pengangguran terbuka. Sedangkan sisanya sebesar 31.94 persen dijelaskan oleh faktor-faktor di luar cakupan penelitian.

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Untuk mengetahui apakah variabel jumlah penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja, serta upah minimum berpengaruh signifikan terhadap faktor tingkat pengangguran terbuka dilakukan uji signifikansi (uji F) secara simultan. Uji F dipergunakan untuk menarik kesimpulan dengan cara membandingkan nilai F-Hitung dengan F-tabel ataupun nilai probabilitas dengan ambang batas signifikansi $\alpha = 5\%$ atau 0,05.

Nilai F-hitung sebesar 18,0631 serta nilai probabilitas sebesar 0,0000 diperoleh dari uji regresi *fixed effect model* yang dipergunakan dalam penelitian. Berdasarkan ambang batas signifikansi 5%, F-tabel menghasilkan 8,534, dengan df1 (k-1) bernilai 3 serta df2 (n-k) bernilai 376. Temuan yang diperoleh adalah $F_{hitung} > F_{tabel}$ dimana $18,0631 > 8,534$ serta probabilitas nilai lebih kecil dari ambang batas signifikansi = 5% yaitu $0,0000 < 0,05$. Dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja, serta upah minimum secara simultan berpengaruh pada tingkat pengangguran terbuka.

3. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji statistik t dipergunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja, serta upah minimum terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka. Uji t dilakukan dengan

membandingkan nilai t hitung dengan t tabel ataupun nilai probabilitas t-statistik dengan signifikansi pada taraf yang digunakan yaitu 0,05.

Berdasarkan ambang batas signifikansi 5%, diperoleh nilai t-tabel sebesar 1,649, dengan nilai df (n-k) sebesar 376. Hasil dari masing-masing variabel ialah sebagai berikut :

Tabel 4. 11 Uji t

Variable	t-statistic	Prob.	$\alpha = 0,05$	Keterangan
LOGJP	3,6314	0,0003	0,05	Signifikan
LOGTPAK	-0,7705	0,4415	0,05	Tidak Signifikan
LOGUMK	-3,7718	0,0002	0,05	Signifikan

Berdasarkan tabel 4.11 diketahui bahwa :

1. Jumlah Penduduk

Hasil uji variabel jumlah penduduk, menunjukkan nilai t-hitung lebih besar daripada t-tabel yaitu dengan nilai $3,6314 > 1,649$ serta nilai probabilitasnya lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ yaitu dengan nilai $0,0003 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Hasil uji variabel tingkat partisipasi angkatan kerja, menunjukkan nilai t-hitung lebih kecil daripada t-tabel yaitu dengan nilai $-0,7705 < 1,649$ serta nilai probabilitasnya lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ yaitu dengan nilai $0,4415 > 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat partisipasi angkatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka.

3. Upah Minimum

Hasil uji variabel upah minimum, menunjukkan nilai t-hitung lebih besar daripada t-tabel yaitu dengan nilai $-3,7718 < 1,649$ serta nilai probabilitasnya lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ yaitu dengan nilai $0,0002 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa variabel upah minimum berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Secara Parsial Jumlah Penduduk, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur

Tujuan dari Teknik analisis data panel yaitu untuk mengetahui secara individu dari tiap variabel independennya yaitu Jumlah Penduduk, tingkat partisipasi Angkatan Kerja dan Upah Minimum terhadap variabel dependennya yaitu pengangguran terbuka yang ada di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011-2020. Dari hasil penelitian ini model data panel yang dipergunakan yaitu menggunakan model FEM atau disebut *fixed effect model* dengan perolehan persamaan regresi sebagai berikut :

$$\text{LOGTPT}_{it} = -38,737 + 3,317 \text{ LOGJP}_{it} - 0,324 \text{ LOGTPAK}_{it} - 0,252 \text{ LOGUMK}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dari perolehan persamaan regresi diatas maka lebih jelasnya akan dibahas di bawah ini sebagai berikut :

1. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Dari sumber badan pusat statistik pengangguran terbuka di Jawa Timur di perkotaan sebesar 7,37 juta. Dan di pedesaan 4,13 persen. Dan dari bidang pendidikan pengangguran terbuka untuk lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih mendominasi dengan kontribusi sebesar 11,89 persen. Dapat dikatakan permasalahan antara tawar menawar tenaga kerja lulusan SMK/SMA di Jawa Timur dengan Tenaga kerja yang dimintai di pasar kerja masih terjadi (Bps, 2021).

Secara teori menjelaskan ada pengaruh positif dan signifikan antara jumlah penduduk dengan jumlah pengangguran Terbuka (Kuntiarti, 2018). Teori dari Adam Smith dan David Ricardo berpendapat bahwasannya kenaikan pengangguran disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk dikarenakan kedudukan penduduk memiliki fungsi tenaga kerja dengan itu penduduk banyak tanpa adanya penyediaan lapangan kerja yang tidak diimbangi sehingga berakibat pada pengangguran yang banyak pula (Kosanke, 2019).

Teori yang dikemukakan oleh David Ricardo yang mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang semakin besar sampai menjadi dua kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan, jumlah tenaga kerja akan melimpah. Kelebihan tenaga kerja akan mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran (Kosanke, 2019). Selain itu juga terdapat teori aliran Marxist (Karl & F. Angel). Menurut Marxist tekanan penduduk di suatu negara bukanlah tekanan penduduk terhadap bahan makanan, tetapi tekanan terhadap kesempatan kerja (misalnya di negara kapitalis).

Dari tekanan kesempatan kerja yang sedikit maka akan menyebabkan jumlah pengangguran meningkat (Saraswati, 2018).

Dengan itu hasil estimasi mengindikasikan secara parsial jumlah penduduk berpengaruh positif serta signifikan terhadap pengangguran terbuka di Jawa Timur. Dengan nilai koefisien sebesar 3,316688 menunjukkan hal tersebut, serta nilai probabilitasnya lebih kecil dari ambang batas signifikansi ($0,0003 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa setiap 1 persen pertambahan jumlah penduduk, akan terjadi peningkatan pengangguran terbuka sebesar 3,316 persen (BPS, 2021).

Jumlah penduduk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel Jumlah Penduduk (X_1) dengan data penduduk di provinsi Jawa Timur yang meningkat tiap tahunnya memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten serta Kota Provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang lebih besar di kabupaten serta kota di Provinsi Jawa Timur memberikan pengaruh yang positif ataupun meningkatkan angka pengangguran terbuka di kabupaten serta kota tersebut (Muminin, M. A., & Hidayat, W. 2017).

Hasil estimasi tersebut sesuai dengan teori yang dijelaskan pada bab sebelumnya. Hubungan Jumlah Penduduk dengan Pengangguran Terbuka memiliki pengaruh positif dan Signifikan. Teori kependudukan dari Malthus, menyatakan bahwa semakin pesatnya jumlah penduduk akan menghasilkan tenaga kerja yang semakin banyak pula, namun hal ini tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang ada. Karena jumlah kesempatan yang sedikit itulah maka manusia saling bersaing

dalam memperoleh pekerjaan dan yang tersisih dalam persaingan tersebut menjadi golongan penganggur (Kosanke, 2019).

Tingginya angka kelahiran di Provinsi Jawa Timur dapat memperbesar jumlah penduduk. Kepadatan penduduk yang tinggi, diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang sangat baik, akan memudahkan mereka untuk mencari pekerjaan di sektor formal. Sebaliknya, kualitas sumber daya manusia yang rendah akan mempersulit mereka mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Akibatnya, penduduk dengan pendidikan rendah dan/atau bakat yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar akan menambah jumlah pengangguran di Jawa Timur (Nagib & Ngadi, 2008).

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian dari Tangke et al., (2019) dengan judul "Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pendidikan serta upah terhadap pengangguran di kabupaten Paser" yang menunjukkan bahwa antara tahun 2007 hingga 2015, jumlah penduduk memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Paser. Hal ini menunjukkan bahwa jika Jumlah Penduduk mengalami peningkatan, tingkat pengangguran juga akan meningkat, serta sebaliknya. Hal ini sejalan dengan yang terjadi di Kabupaten Paser. Setiap tahunnya, jumlah penduduk Kabupaten Paser, Kalimantan Timur terus bertambah, begitu pula dengan jumlah pengangguran. Hal ini kemungkinan terjadi karena penyerapan tenaga kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk serta tidak dibarengi dengan penciptaan lapangan kerja baru sehingga menimbulkan pengangguran. Populasi yang meningkat dapat menjadi pendorong serta penghambat kemajuan ekonomi (Tangke, R.P., Juliansyah, J., & Lestari, D. 2019).

Selain itu, hasil penelitian ini sejalan juga dengan (Azizah, 2016) dengan Judul “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Inflasi, Terhadap Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2014” dengan hasil Variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, ini mengindikasikan apabila jumlah penduduk naik maka pengangguran terbuka juga akan meningkat. Hal ini terjadi karena pendidikan terakhir angkatan kerja yang rendah dan kenaikan jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan kenaikan kesempatan kerja. (Azizah, 2016).

2. Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan hasil estimasi, tingkat partisipasi angkatan kerja tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif serta tidak signifikan terhadap pengangguran terbuka di Jawa Timur. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar - 0.323632 serta nilai probabilitasnya lebih besar dari tingkat signifikansi ($0,4415 > 0,05$). Artinya setiap peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 1 persen akan direspon dengan penurunan pengangguran terbuka sebesar 0,323 persen. Dengan itu hasil pada Provinsi Jawa Timur disimpulkan tidak adanya pengaruh signifikan dan berpengaruh negatif terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2020.

Sesuai dengan teori yang menjelaskan ada pengaruh negatif antar tingkat partisipasi angkatan kerja dengan Pengangguran Terbuka (Kuntiarti, 2018). Menurut Sukirno pengangguran terbuka merupakan Angkatan kerja yang siap

untuk bekerja namun tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan, yang sedang mendirikan sebuah usaha atau orang yang belum mulai bekerja (Faizah & Woyanti, 2023). Angkatan kerja dengan memakai salah satu indikator tingkat partisipasi Angkatan kerja sebagai salah satu alat ukur untuk menghitung pengaruh tingkat partisipasi Angkatan kerja terhadap pengangguran terbuka yang dimana semakin tinggi tingkat partisipasi Angkatan kerja semakin baik jika diiringi dengan bertambahnya partisipasi penduduk yang bekerja. Yang artinya semakin tinggi angka tingkat partisipasi Angkatan kerja akan menurunkan angka pengangguran (Faizah & Woyanti, 2023).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja secara tanda sesuai teori memiliki pengaruh negatif namun tidak cukup berpengaruh secara signifikan dikarenakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di provinsi Jawa Timur meningkat ditahun 2020 meskipun tidak sampai satu persen yaitu sebesar 70,33 persen meningkatnya sebesar 0,72 persen dibandingkan dengan bulan yang sama ditahun yang berbeda (Perdana, 2020). Kenaikan TPAK menurut dadang memberikan indikasi adanya kenaikan potensi ekonomi dari sisi pasokan atau (*supply*) tenaga kerja (Perdana, 2020). Menurutny kenaikan TPAK ini karena adanya kenaikan penduduk bekerja yang terserap di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Sehingga TPAK tidak mempengaruhi pengangguran terbuka di provinsi Jawa Timur pada tahun 2011-2020 (Perdana, 2020).

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian dari (Badria, 2022) dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pengangguran di Indonesia Tahun 2011-2020”

hasilnya memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka. Hal tersebut karena tingginya tingkat partisipasi Angkatan kerja yang diiringi dengan bertambahnya partisipasi penduduk yang bekerja. Teori ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Khusnusi Khotimah yaitu Angkatan kerja dengan indikator TPAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di DIY. Artinya semakin tinggi angka TPAK akan menurunkan angka pengangguran.

3. Pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Temuan estimasi menyebutkan bahwa upah minimum tidak berpengaruh terhadap pengangguran terbuka atau memiliki pengaruh negatif serta signifikan terhadap pengangguran terbuka di Jawa Timur secara parsial. Nilai koefisien sebesar -0,252573 menunjukkan hal tersebut, dan nilai probabilitasnya lebih kecil dari ambang batas signifikansi ($0,0002 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa untuk setiap kenaikan 1 persen upah minimum, akan terjadi penurunan pengangguran terbuka sebesar 0,252 persen.

Pada hasil tersebut menjelaskan bahwa hasil penelitian ini sesuai dengan teori W Phillips yang menyebutkan bahwa ketika upah tinggi pengangguran berada pada tingkat yang rendah. Kurva Phillips merupakan pengaruh terbalik antara tingkat pengangguran dan tingkat kenaikan upah nominal. Semakin tinggi tingkat pengangguran, maka semakin rendah tingkat inflasi upah. Adanya *trade off* antara inflasi upah dan pengangguran.

Kenaikan upah minimum akan mendorong orang untuk mencari pekerjaan serta menerima tawaran pekerjaan yang ada, sehingga menurunkan pengangguran

(Kuntiarti, 2018). Kenaikan upah minimum akan membantu memotivasi serta membantu masyarakat dalam mencari nafkah (Sembiring & Sasongko, 2019). Dengan itu teori ini menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran Terbuka (Kuntiarti, 2018).

Selain itu, dari hasil penelitian tersebut yang dinyatakan bahwa upah minimum kota atau kabupaten (UMK) memberikan dampak negatif terhadap tingkat pengangguran sejalan dengan teori upah efisiensi yang menjelaskan bahwa upah yang tinggi akan mendorong kualitas dan produktivitas para pekerja bagi perusahaan, dan upah yang rendah akan menimbulkan permasalahan baik bagi para pekerja maupun perusahaan (Nabila & Rozaini, 2022).

Oleh sebab itu, disimpulkan bahwa di Provinsi Jawa Timur tenaga kerja menentukan tingkat upah, dimana apabila upah tinggi maka akan meningkatkan penawaran tenaga kerja sedangkan saat upah tidak sesuai maka tenaga kerja akan malas untuk bekerja yang menyebabkan naiknya tingkat pengangguran. Dengan meningkatnya tingkat pengangguran, tentu akan menyebabkan pendapatan per kapita masyarakat rendah dan produktivitas tenaga kerja juga akan menurun yang menyebabkan minat investasi berkurang sehingga pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur menurun (Nabila & Rozaini, 2022).

Dari hasil penelitian khususnya di Jawa Timur yang menunjukkan bahwa upah semakin naik namun jumlah pengangguran semakin menurun ini juga sesuai dengan teori upah minimum di pasar kompetitif bahwa menaikkan upah minimum memiliki dampak negatif pada tingkat pengangguran (Kuntiarti, 2018). Penelitian ini mendukung temuan Faliasari & Setiawan (2021) dengan judul “Pengaruh

Angkatan Kerja, Upah, PDRB Dan Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Banten 2002-2019” yang menemukan bahwa upah berpengaruh negatif serta signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten (Filiarsari, A & Setiawan, A.H, 2021). Hal ini ditunjukkan dengan nilai t-hitung sebesar 5,03 serta nilai probabilitas sebesar 0,0002 pada tingkat signifikansi 0,05 dengan nilai koefisien sebesar -0,138 yang menunjukkan bahwa untuk setiap kenaikan elastisitas upah sebesar satu persen, tingkat elastisitas tingkat pengangguran menurun sebesar 0,138 persen (Filiarsari, A & Setiawan, A.H, 2021).

Menurut penelitian lain juga yaitu penelitian oleh (Tangke et al., 2019) dengan judul ”Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pendidikan serta upah terhadap pengangguran di kabupaten Paser” yang menunjukkan upah memberikan pengaruh signifikan negatif terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Paser tahun 2007 sampai tahun 2015. Hal ini mengindikasikan bahwa jika upah naik maka tingkat pengangguran akan turun. Sebaliknya jika upah menurun, tingkat pengangguran meningkat. Jika Upah di suatu daerah itu ditetapkan terlalu rendah, maka akan mengakibatkan tingginya angka pengangguran di daerah tersebut.

Sejak tahun 2005, penerapan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai salah satu komponen dalam penetapan upah minimum menjadi indikator positif dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan, apalagi setelah sebelumnya hanya menggunakan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Kenaikan upah juga meningkatkan insentif masyarakat untuk bekerja sehingga menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Paser (Tangke, R. P., Juliansyah, J., & Lestari, D. 2019).

Selain itu, penelitian ini juga sama pada penelitian oleh (Cahyo, 2016) dengan Judul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Rata-Rata Lama Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2009-2014” yang menjelaskan bahwa hasil penelitian ini berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan negatif. yang sama halnya pada penelitian ini yang tidak sesuai dengan teori kekakuan upah, dimana ketika upah semakin naik maka akan menambah jumlah pengangguran. Tidak demikian dengan Jawa Timur yang terjadi justru sebaliknya, upah semakin naik tetapi jumlah pengangguran semakin menurun (Cahyo, 2016).

Hal ini dipicu oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi sehingga mendorong munculnya unit usaha baru di Jawa Timur. Tahun 2010 jumlah unit usaha di Jawa Timur sebanyak 742.671 unit. Dalam kurun waktu tiga tahun jumlahnya bertambah 60.782 unit, menjadi 803.453 pada tahun 2013. Bertambahnya unit usaha baru di Jawa Timur akan meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja sehingga tingkat pengangguran terbuka setiap tahunnya terus menurun. Disnakertransduk Jawa Timur pada tahun 2016 menyetujui sebanyak 89 perusahaan untuk melakukan penangguhan pembayaran upah minimum. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, jumlahnya meningkat 9 perusahaan.

Dari 89 perusahaan yang disetujui melakukan penangguhan pembayaran upah minimum terdapat 38.469 tenaga kerja yang ditangguhkan (Disnakertransduk, 2016). Adanya kebijakan penangguhan upah akan menciptakan iklim usaha yang baik antara pekerja dan pengusaha. Dari sisi pengusaha, kegiatan produksi akan tetap dapat berlangsung tanpa harus mengurangi salah satu faktor produksinya.

Sedangkan dari sisi pekerja, motivasi para tenaga kerja akan meningkat karena mereka merasa ada jaminan atas pekerjaannya (Cahyo, 2016).

Alasan lainnya adalah dengan meningkatnya upah minimum setiap tahun permintaan tenaga kerja pada sektor formal akan berkurang, sehingga angkatan kerja yang tidak terserap di sektor formal akan memilih untuk bekerja di sektor informal. Dengan begitu angkatan kerja tetap bisa mendapatkan pekerjaan meskipun biasanya upah yang didapatkan di bawah upah minimum yang telah ditentukan. Berdasarkan data Sakernas hingga tahun 2015 penduduk yang bekerja pada sektor formal di Jawa Timur mencapai 7,26 juta orang atau sebesar 36,68 persen, lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk yang bekerja pada sektor informal yang mencapai 12,54 juta orang atau sebesar 63,32 persen (Cahyo, 2016).

4.4.2 Pengaruh Secara Simultan Jumlah Penduduk, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur

Pengaruh dari Variabel Jumlah Penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja dan upah minimum secara bersama-sama terhadap tingkat pengangguran terbuka menggunakan Uji F. Dari tabel hasil estimasi Regresi *Fixed Effects Model (FEM)* bahwasanya nilai F-Hitungnya sebesar 18,0631 serta nilai probabilitasnya yang sebesar 0,0000 yang diperoleh dari Uji Regresi FEM atau *fixed effect model*. Dari nilai probabilitasnya sebesar 0,0000 yang kurang dari 0,05. Dengan itu variabel X secara bersama-sama mempengaruhi variabel Y dengan artian bahwa terdapat pengaruh secara simultan antar variabel X yang terdiri dari Jumlah Penduduk,

tingkat partisipasi Angkatan Kerja dan Upah Minimum terhadap tingkat Pengangguran Terbuka sebagai variabel Y.

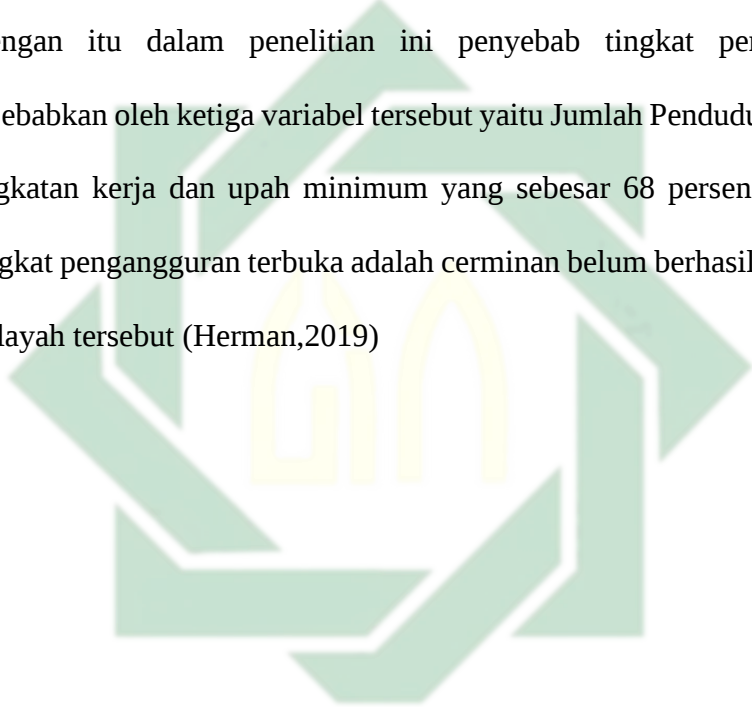
Kemudian juga, Uji R-Squarednya sebesar 0,6806 atau juga sebesar 68 persen yang menjelaskan bahwa variabel X yang terdiri dari Jumlah Penduduk, tingkat partisipasi Angkatan Kerja dan Upah Minimum tersebut mempengaruhi sebesar 68 persen terhadap pengangguran Terbuka sebagai variabel Y. Sedangkan sisanya 32 persen dipengaruhi oleh variabel lain atau diluar penelitian ini.

Menurut Badan Pusat Statistik mendefinisikan pengangguran terbuka yaitu pengangguran terbuka yaitu seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan, masih mencari kerja, berusaha mempersiapkan usahanya serta yang tidak mencari kerja dikarenakan mereka memiliki pemikiran tidak akan pernah memperoleh pekerjaan serta yang sudah punya pekerjaan namun belum memulai bekerja (BPS, 2022). Sedangkan, jumlah penduduk yang terlalu melampaui batas maka akan menekan standar hidup masyarakat. Jumlah penduduk senantiasa berubah ubah dalam waktu ke waktu. Dengan naiknya jumlah penduduk maka terjadilah kepadatan penduduk disuatu wilayah tersebut (Saraswati, 2018).

Jumlah penduduk yang secara luas juga terdapat tingkat partisipasi Angkatan kerja. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja atau jumlah tenaga kerja (Alghofari, 2020). TPAK mengindikasikan besaran ukuran relatif penawaran tenaga kerja (*labour supply*) yang terlibat dalam produksi barang maupun jasanya melalui suatu perekonomian (Alghofari, 2020). Dalam perekonomian tiap tahunnya pemerintah di Indonesia selalu meningkatkan upah minimum di tiap-tiap daerah khususnya di Jawa Timur.

Kebijakan pengupahan dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan kehidupan yang layak bagi buruh. Dengan kebijakan pengupahan yang dibuat pemerintah tersebut diharapkan dapat melindungi buruh agar buruh dapat memenuhi kebutuhannya sendiri maupun keluarganya. (Ramadhani, 2020).

Dengan itu dalam penelitian ini penyebab tingkat pengangguran terbuka disebabkan oleh ketiga variabel tersebut yaitu Jumlah Penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja dan upah minimum yang sebesar 68 persen. Dapat disimpulkan tingkat pengangguran terbuka adalah cerminan belum berhasilnya pembangunan di wilayah tersebut (Herman,2019)



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang sudah dibahas dengan itu maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil perhitungan secara parsial variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka dengan nilai probabilitasnya 0,0003 kurang dari 0,05. Kedua, variabel tingkat partisipasi angkatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka dengan nilai probabilitasnya 0,4415 lebih besar dari 0,05. Terakhir, variabel upah minimum tidak berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka dengan nilai probabilitasnya 0,0002 kurang dari 0,05.
2. Berdasarkan hasil perhitungan secara simultan antara variabel Jumlah penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2011-2020 memiliki pengaruh yang signifikan. Dengan nilai F-Hitung sebesar 18,0631 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,0000. Dan juga hasil R-Squared sebesar 0,6806 dengan artian Tingkat Pengangguran Terbuka mampu menjelaskan sebesar 68 persen dari variabel Jumlah Penduduk, Tingkat partisipasi Angkatan kerja dan Upah Minimum, sisanya 32 persen dapat dijelaskan diluar variabel ini.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis dapat memberikan saran yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan bagi penelitian berikutnya dapat dijadikan referensi dan juga dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya dengan menambahkan variabel-variabel bebas lain dengan variabel yang berbeda lagi ataupun menggunakan model selain analisis regresi data panel dengan analisis yang lebih berbeda lagi, memperbaharui tahun penelitian serta lokasi penelitian untuk lebih menyempurnakan hasil penelitian selanjutnya.

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan pemerintah provinsi Jawa Timur agar dapat mengurangi tingkat pengangguran terbuka dikarenakan pemerintah harus lebih memperhatikan tingkat jumlah penduduk yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka dan perlunya meningkatkan skill yang dimiliki dari setiap individunya, dengan harapan pemerintah memperhatikan fasilitas bagi individu yang memiliki skill bagi yang tidak berkuliah atau yang sedang bekerja. Perlunya memperluas lapangan kerja, perlunya mengurangi ledakan jumlah penduduk dengan mengadakan sosialisasi keluarga berencana, risiko menikah muda di seluruh daerah secara merata karena jika angka jumlah penduduk dapat ditekan maka TPT juga ikut berkurang dengan itu dapat mengurangi jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Alghofari, F. (2020). Analisis Tingkat Pengangguran Di Indonesia Tahun. 1980-2007 Farid Alghofari Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Alghofari, F. (2020). The Effect of Gross Domestic Regional Product , Workforce , and Minimum Wage on the Unemployment Rate in Malang City.
- Anggoro, M. H. (2015). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan angkatan kerja terhadap tingkat pengangguran di kota Surabaya. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 3(3).
- Arianto, C. E., Sumarsono, S., Adenan, M., Ilmu, J., Ekonomi, F., Unej, U. J., & Kalimantan, J. (2018). The Influence Of The Population and Unemployment To Economic Growth Jember District. *Artikel Il Miah Mahasiswa*, 1(4), 1–6.
- Azizah, F. I. N. (2016). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonmi, Dan Inflasi, Terhadap Pengangguran Terbuka Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2010 – 2014.
- BPS JawaTimur. (2021). Hasil Sensus Penduduk 2020 Jumlah penduduk Jawa Timur Hasil. September, 1–12.
<https://jatim.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1224/jumlah-penduduk-jawa-timur-hasil-sensus-penduduk-2020-sp2020-sebesar-40-67-juta-orang.html>.
- BPS. (2022). Analisis Profil Penduduk Indonesia. <https://www.bps.go.id/>.
- Badria, F. A. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Partisipan Angkatan Kerja, dan Upah Minimum Provinsi terhadap Pengangguran di Indonesia Tahun 2011-2020. *EKONOMI DAN BISNIS: Percikan Pemikiran*
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=XIN-EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA58&dq=upah+minimum+and+pertumbuhan+ekonomi&ots=ZoCqYGw2MN&sig=F_BKOXutN2ZPsyru1eYvhQgPq5g%0Ahttp://etheses.iainponorogo.ac.id/15983/1/210717168_frida+ayu+badria.pdf.
- Cahyo, R. D. (2016). Nalisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Dan Rata-Rata Lama Prndidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2009-2014. *Jurnal Ilmiah*, 10(2), 1–13.
- Dainty, G., Roring, J., Kumenaung, A. G., Lopian, A. L. C. P., & Ratulangi, U. S. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4 Kota Di Provinsi Sulawesi Utara Pendahuluan. Latar Belakang Pengangguran merupakan masalah yang kompleks karena mempengaruhi dan juga dipengaruhi oleh banyak faktor. 20(4), 70–87.
- Dampak, A., & Di, C. (2022). Analisis dampak covid 19 di bidang ketenagakerjaan. IX, 392–400.
- Disnakertransduk Jawa Timur. 2016. Disnakertransduk Setujui 89 Perusahaan Ajukan Penangguhan UMK 2016. <http://www.disnakertransduk.jatimprov.go.id> diakses 6 Juni 2016.
- Diskominfo. (2020). Tak Hanya Penggangguran, Dampak Covid 19 Membuat Jumlah PHK Meningkat di Tahun 2020. <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/statistik/tak-hanya-penggangguran-dampak-covid-19-membuat-jumlah-phk-meningkat-di-tahun-2020>.

- Diskominfo. (2021). *Bahasa Jawa di Jawa Timur*. 2021. [https://kominformagetan.go.id/bahasa-jawa-di-jawa-timur/#:~:text=kemdikbud.go.id%2C Jawa,bahasa jawa dan bahasa madura](https://kominformagetan.go.id/bahasa-jawa-di-jawa-timur/#:~:text=kemdikbud.go.id%2C%20Jawa,bahasa%20jawa%20dan%20bahasa%20madura).
- Djohanputro,(2020).*Pengangguran Indonesia*.Suparyanto Dan Rosad (2015), 5(3),248-253.
- Ekonomi, F., & Diponegoro, U. (2018). *Pengangguran Terbuka*. 32(2), 45-50.
- Engka, D. S. M. (2019). Pengangguran Di Sulawesi Utara The Effect Of Working Workforce And Total Population Towards Unemployment Rate In North Sulawesi. 7(8), 3389–3397.
- Fahri, Jalil, A., & Kasnelly, S. (2020). Meningkatnya Angka Pengangguran Di Tengah Pandemi (Covid-19). *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 45–60. <http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/almizan/article/view/142>
- Farid, A. (2017). Analisis Tingkat Pengangguran Di Indonesia Tahun 1980-2007 Farid Alghofari Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. *Analisis Tingkat Pengangguran Di Indonesia Tahun 1980-2007*, 1–31.
- Faizah, U. N., & Woyanti, N. (2023). *Analisis Pengaruh Pendidikan , Partisipasi Kerja , Dan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Di Provinsi Banten Tahun*. VI(1), 48–61.
- Filiasari, A., & Setiawan, A. H. (2021). Pengaruh Angkatan Kerja, Upah, PDRB, dan Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Banten Tahun 2002-2019. *Diponegoro Journal of Economics*, 10(2).
- Gujarati dan Porter (2019). *Model Regresi Data Panel*. Metode Penelitian. Jurnal Ilmu Ekonomi. (4),4-8.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23* (8th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2013). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika: Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan EvIEWS 8*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali dan Ratmono, (2020). *Pengujian Asumsi Klasik*. Statistik Ekonometrika. Ilmu ekonomi (3),5-19.
- Herman, H. (2019). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Upah Minimum Kota Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Pekanbaru tahun 2010-2017. *Relasi : Jurnal Ekonomi*, 15(2), 220–232. <https://doi.org/10.31967/relasi.v15i2.309>
- Herniwati, D. P., & Handayani, R. (2019). Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Economics*, 1(1), 166.
- Iii, B. A. B. (2020). Bab iii metode penelitian 3.1. 24–29.
- Irwansyah, R. (2019). Skripsi analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap pengangguran terbuka di kota pekanbaru.
- Ishak K. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Dan Implikasi Terhadap Indek Pembangunan Di Indonesia. *Revista Brasileira de Ergonomia*, 9(2), 10. <https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/355%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/731%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/269%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article>

[/view/106](#)

- Jatimprov. (2020). Profil Jawa Timur. 2020.
<https://jatimprov.go.id/profile#:~:text=Provinsi Jawa Timur secara geografis,Timur daratan dan Kepulauan Madura>.
- Kosanke, R. M. (2019). *Landasan Teori*. Pembangunan Ekonomi. (2). Jurnal Ekonomi. 15–53.
- Kuntiarti, D. D. (2018). Pengaruh inflasi, jumlah penduduk dan kenaikan upah minimum terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Banten tahun 2010-2015. *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi*, 7(1), 1–9.
- Ma'arief. (2021). *Teori ketenagakerjaan*. Jurnal Ilmu Ekonomi 1–6.
- Mahyus Ekananda, *Analisis Ekonometrika Data Panel*, (Jakarta: Mitra Media Wacana, 2016)
- Mankiw. (2019). Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2), 265–283. <https://doi.org/10.24815/jped.v4i2.13022>
- Mulyadi. (2020). Landasan Teori Tenaga Kerja. *Makroekonomi, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, 1, 13–43.
- Muminin, M. A., & Hidayat, W. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(3), 374–384.
- Nabila, N., & Rozaini, N. (2022). Pengaruh Inflasi Dan Upah Minimum Kota (Umk) Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kota Padang Sidempuan. *Niagawan*, 11(3), 224. <https://doi.org/10.24114/niaga.v11i3.36635>
- Nagib, L., & Ngadi. (2008). Challenges of Unemployment in Indonesia: Trends, Issues and Policies. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 3(2), 1–28.
- Nazir, (2020). Metode Penelitian. *Jurnal Ilmu Ekonomi* (3).7-25.
- Nursafitri, & Selly. (2020). Tingkat Pengangguran Terbuka Di Jawa Timur Tahun 2013-2018 Oleh : Tingkat Pengangguran Terbuka Di Jawa Timur Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Ekonomi Oleh : Universitas Islam Negeri Sunan Amp.
- Perdana, D. (2020). Angkatan Kerja Jatim Meningkatkan Bersamaan Naiknya Tingkat Pengangguran Terbuka. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/angkatan-kerja-jatim-meningkat-bersamaan-naiknya-tingkat-pengangguran-terbuka/>
- Permadi, E., & Chrystanto, E. (2021). Analisa Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2018. 5(2).
- Pratama, R. B. (2019). Metodologi Penelitian. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 28–55.
- Putong. (2019). *Makro Ekonomi*. Journal Ekonomi. 37, 24-45
- Ramadhani, F. (2020). Oleh : Filma Ramadhani. Analisis Terhadap Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbang Utama Dalam Penetapan Upah Minimum Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2017-2019.
- Rizal, M. (2021). Pengaruh Inflasi Dan Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran

- Di Kota Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Romadhon, A. (2022). Pengaruh Upah Minimum Regional Dan Angkatan Kerja Terhadap. 2022.
- Roslani, S. M. (2017). Pengaruh Pemberian Reward and Punishment Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas X Pada Mata Pelajaran Pkn Di Sma Pasundan 3 Bandung. *NASPA Journal*, 33, 26–36.
- Saraswati, M. (2018). Be Smart Ilmu Pengetahuan Sosial. *Grafindo Media Pratama*, 15.
- Sembiring, V. B. P., & Sasongko, G. (2019). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, Upah Minimum, dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran di Indonesia Periode 2011–2017. *International Journal of Social Science and Business*, 3(4), 430–443.
- Setiawan, J., Saleh, M., & Yuliati, L. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2015. *Journal Ekuilibrium*, II(1), 31–37.
- Setyaningsih, A. (2021). Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Upah Minimum Regional Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tasikmalaya Tahun 2009-2019. <http://repo.uinsatu.ac.id/21285/>
- Setyowati, F. R. S. ; E. (2022). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum, Dan PDRB Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Barat Fajar. 10(2), 879–888.
- Sheila Maria Belgis Putri Affiza. (2022a). Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Upah Minimum Regional Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tasikmalaya Tahun 2009-2019. *הארץ*, 8.5.2017, 2003–2005. <http://repositori.unsil.ac.id/5440/>
- Sheila Maria Belgis Putri Affiza. (2022b). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Smk Di Jawa Timur Tahun 2012 – 2020. *הארץ*, 8.5.2017, 2003–2005.
- Silaban, P. S. M. J., Sembiring, I. P. S. B., & Sitepu, V. A. B. (2020). Analisis Pengaruh PDRB dan Inflasi terhadap Pengangguran Terbuka di Sumatera Utara Periode 2003-2019. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 11(2), 127. <https://doi.org/10.36982/jiegm.v11i2.1077>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. 38–50. [http://repository.stei.ac.id/2117/3/BAB 3.pdf](http://repository.stei.ac.id/2117/3/BAB%203.pdf)
- Sukarno. (2019). *Pengangguran*. *Journal Of Economics*. 15–49.
- Suriati. (2020). Pengaruh Jumlah Angkatan Kerja, Upah Minimum dan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Pembangunan Dan Pemerataan*, 10(3), 5.
- Tangke, R. P., Juliansyah, J., & Lestari, D. (2019). Pengaruh jumlah penduduk dan pendidikan serta upah terhadap pengangguran di kabupaten paser. *Kinerja*, 16(1), 69–77.
- Ulfa, D. M. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Dan Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Pada Provinsi Banten Dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 – 2019. <http://repo.uinsatu.ac.id/20154/>
- Wahyuningtias, R. (2019). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi

- Angkatan Kerja di Pulau Jawa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (Universitas Brawijaya)*, 7(2), 1–14.
- Wati, Y. R. K. (2022). Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember. *Digital Repository Universitas Jember, September 2019*, 2019–2022.
- Zuliasari, S., & Rachmawati, L. (2021). Analisis Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, Upah Minimum Terhadap Pengangguran di Kabupaten/Kota Jawa Timur. *INDEPENDENT: Journal Of Economics*, 1(1), 105–119.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A